



# 2025 DOKUMEN LKJIP

---

**DINAS PERINDAGKOP DAN  
UKM KAB.WAJO**

*Jl.Bau Baharyuddin No. Skg*

# DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
BAB I	
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	2
B. Struktur Organisasi .....	2
C. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama .....	32
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA .....	33
A. Rencana Strategis	
1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	33
2. Publikasi .....	34
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
1. Rekapitulasi PK Kepala Perangkat Daerah ( Jabatan Tinggi Pratama ) Pejabat Administrator dan Pengawas .....	35
2. Publikasi .....	41
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA .....	42
A. Capaian Kinerja Organisasi	
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja .....	44
2. Perbandingan Antara Realisasi Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023 .....	53
3. Perbandingan Realisasi dengan Target Renstra Perangkat Daerah .....	55
4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional (Jika ada) .....	56
5. Analisis Penyebab peningkatan/penurunan kinerja dan solusi .....	57
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	59
7. Analisis Evaluasi Program/Kegiatan .....	65
B. Realisasi Anggaran	
1. Realisasi Anggaran .....	71
2. Rasio Belanja Terhadap Sasaran Perangkat Daerah .....	79
3. Rasio Belanja terhadap Sasaran RPD .....	85
4. Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Daerah .....	91
BAB IV	
PENUTUP .....	93
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94
LAMPIRAN .....	95

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pangkat, Eselon, Dan Pendidikan.....	16
Tabel 1.1	SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	19
Tabel 1.2	SDM Berdasarkan Spesialisasi Pendidikan .....	19
Tabel 1.3	SDM Berdasarkan Jabatan ( ASN ) .....	19
Tabel 1.2	Jumlah PPPK dan PPPK Paruh Waktu .....	20
Tabel 1.3	Jumlah PPPK dan PPPK Paruh Waktu Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025 Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi DAN UKM .....	20
Tabel 2.1	Rencana Strategis Dinas Perindagkop Tahun 2025 .....	34
Tabel 2.2	Rekapitulasi Perjanjian Kinerja Dinas Perindagkop Tahun 2025 .....	36
Tabel 3.1	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kerja .....	44
Tabel 3.1.1	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 .....	46
Tabel 3.1.2	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 .....	48
Tabel 3.1.3	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 .....	50
Tabel 3.1.4	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4 .....	51
Tabel 3.2	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023 .....	53
Tabel 3.3	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target Renstra Perangkat Daerah .....	55
Tabel 3.4	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional .....	56
Tabel 3.5	Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi .....	57
Tabel 3.6	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	59
Tabel 3.6.1	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	60
Tabel 3.7	Analisis Evaluasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan .....	65
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Dinas Perindagkop Tahun 2025 .....	72
Tabel 3.9	Rasio Belanja Terhadap Sasaran Strategis Perangkat Daerah .....	79
Tabel 3.10	Rasio Belanja Terhadap Sasaran Strategis RPD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 .....	85
Tabel 3.11	Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah .....	92

## **KATA PENGANTAR**

Setiap unit pemerintahan yang ada dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo, termasuk Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo , harus berpartisipasi dalam mewujudkan terselenggaranya good governance dengan mengembangkan dan menerapkan suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

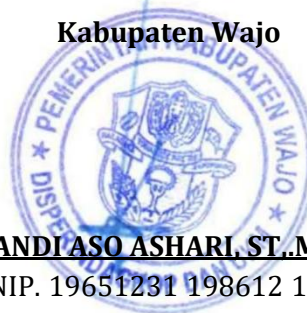
Untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan yang telah dilakukan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo serta mempertanggung jawabkan tugas, wewenang dan sumber daya yang telah diberikan dibutuhkan suatu pertanggung jawaban berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo Tahun anggaran 2025. Dasar pembuatan LAKIP ini terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. dimana OPD Kabupaten Wajo harus membuat laporan kinerja yang memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Wajo untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam laporan ini diungkapkan seluruh aktifitas yang dilakukan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo Tahun 2025 yang telah tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2026

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak. Atas bantuan dan kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih.

Sengkang, 31 Januari 2026

**Kepala Dinas Perindustrian,  
Perdagangan, Koperasi dan UKM  
Kabupaten Wajo**



**ANDI ASO ASHARI, ST.,M.Si**  
NIP. 19651231 198612 1 007

# BAB I

## PENDAHULUAN

*Pada bab kesatu ini digambarkan tentang gambaran umum organisasi, struktur organisasi dan sumber daya organisasi serta Permasalahan Utama (Strategic Issued) organisasi.*

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan berupa fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan dengan mengedepankan wewenang yang mengacu pada asas-asas umum pemerintahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 3 dengan tujuan menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.

Untuk menjamin tercapainya pola penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Kebijakan dimaksud dipertegas lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, di mana pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi pemerintah adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Melalui mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah/Kabupaten Wajo. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan

/sasaran strategis instansi pemerintah yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP Pemerintah Daerah Kabupaten disampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya tiga bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

LKjIP ini disusun untuk memberikan tuntutan agar instansi pemerintah sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dalam suatu system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Esensinya adalah perwujudan dari implementasi system pengendalian sector public. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen dari **Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo** untuk memastikan bahwa rencana strategis dapat dipenuhi melalui implementasi program dan kegiatan yang selaras.

Melihat pada uraian di atas, maka maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LjKIP **Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo** Tahun 2025 adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dibentuk organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Pemerintah Kabupaten Wajo. Sedangkan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas **Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo** diatur dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 171 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja DISPERINDAGKOP dan UKM Kab.Wajo dan Keputusan Bupati Wajo Nomor 784 Tahun 2021 Tentang Kelompok tugas Sub Substansi dan Nomenklatur subkoordinator untuk pelaksana tugas subkoordinator pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, KoperasiUsaha Kecil, dan Menengah.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 171 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja DISPERINDAGKOP dan UKM Kab.Wajo Dinas Perindustrian, Perdagangan, KoperasiUsaha Kecil, dan Menengah adalah: melaksanakan urusan Pemerintahan bidang

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati..

Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo merupakan salah satu dari 27 dinas yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wajo.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan Daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan Daerah .
3. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

## **2.2.1 Tugas, fungsi dan Kedudukan Organisasi**

### **A. Kelompok Jabatan Struktural**

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai **tugas pokok yaitu :**

Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan di lingkup DISPERINDAGKOP dan UKM serta membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi, Usaha kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas mempunyai **Fungsi yaitu :**

- a. perumusan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan administrasi Disperindagkop dan UKM; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain terhadap Kepala Dinas yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.

#### **2. Sekretariat :**

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai

**tugas pokok yaitu :**

Merencanakan operasional kegiatan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengatur, menyelia mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretarian berupa memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan

pelaporan serta keuangan dalam lingkup Disperindagkop dan UKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Fungsi yaitu :**

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya

**Sub bagian Umum dan Kepegawaian;**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas;

**Tugas :** merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, pegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Uraian Tugas :**

- a. penyusunan kebijakan teknis di Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepada staf dalam lingkup Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

**Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;**

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai

**Tugas Pokok:**

Merencanakan Kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaran tugas sub bagian perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai

**Uraian Tugas :**

- a. Merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaaan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dibidang perencanaan dan pelaporan;

- c. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan subbagian perencanaan dan pelaporan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Mengendalikan rencana kinerja tahunan;
- e. Menyiapkan bahan serta dalam merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana Disperindagkop dan UKM meliputi pemeliharaan gedung, Pemeliharaan Peralatan Kantor, dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana kerja anggaran Disperindagkop dan UKM sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan laporan akuntabilitas instansi pemerintah;
- h. Menyiapkan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- i. Memberi tugas kepada bawahan;
- j. Membimbing bawahan sesuai dengan prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- k. Memeriksa dan mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai dengan prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- l. Menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Sub bagian Keuangan.**

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai

#### **Tugas pokok :**

Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas subbag keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

#### **Uraian Tugas yaitu :**

- a. Merencanakan kegiatan subbagian keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dibidang keuangan;
- c. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan subbagian keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Melaksanakan penggajian pegawai di lingkup Disperindagkop dan UKM;
- e. Melaksanakan penatausahaan keuangan daerah lingkup Disperindagkop dan UKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan perbendaharaan keuangan di lingkup Disperindagkop dan UKM;
- g. Melaksanakan verifikasi terhadap keuangan di lingkup Disperindagkop dan UKM;
- h. Menyusun Laporan Keuangan akhir tahun Disperindagkop dan UKM;

- i. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Membimbing bawahan sesuai dengan prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- k. Menyediakan data dan informasi terkait dengan bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
- l. Menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

### **'3. Bidang Perdagangan:**

Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Kemeterologian yang mempunyai

#### **Tugas pokok :**

membantu Kepala Diperindagkop dan UKM merencanakan operasional, mengoordinasikan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan dibidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan barang penting, dan barang penting, dan pengawasan dan tertib niaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Fungsi :**

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan barang penting, dan pengawasan dan tertib niaga;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan barang penting, dan pengawasan dan tertib niaga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan barang penting, dan pengawasan dan tertib niaga; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

### **'4. Bidang Pengelolaan Pasar:**

Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar yang mempunyai tugas:

**Tugas :** membantu Kepala Diperindagkop dan UKM merencanakan operasional,

mengoordinasikan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan dibidang pengelolaan dan retribusi pasar, pemeliharaan dan penertiban pasar, dan sarana dan prasarana pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Fungsi :**

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan dan retribusi pasar, pemeliharaan dan penertiban pasar, dan sarana dan prasarana pasar;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan dan retribusi pasar, pemeliharaan dan penertiban pasar, dan sarana dan prasarana pasar;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan dan retribusi pasar, pemeliharaan dan penertiban pasar, dan sarana dan prasarana pasar; dan
- d. melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

#### **'5. Bidang Perindustrian**

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang Perindustrian yang mempunyai tugas Pokok :

**Tugas :** membantu Kepala Dinas merencanakan operasional, mengoordinasikan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan dibidang industri tekstil, aneka dan elektronika telematika, industri agro, kimia dan hasil hutan, dan industri logam, mesin dan alat transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Fungsi :**

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang industri tekstil, aneka dan elektronika telematika, industry agro, kimia dan hasil hutan, dan industri logam, mesin dan alat transportasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang industry tekstil, aneka dan elektronika telematika, industry agro, kimia dan hasil hutan, dan industry logam, mesin dan alat transportasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang industry tekstil, aneka dan elektronika telematika, industry agro, kimia dan hasil hutan, dan industry logam, mesin dan alat transportasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

#### **6. Bidang Pemberdayaan Koperasi**

Bidang Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang Koperasi yang mempunyai tugas tugas pokok :

**Tugas :** membantu Kepala Dinas merencanakan operasional, mengoordinasikan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan dibidang perizinan dan kelembagaan, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi, pemeriksaan, pengawasan, dan penilaian kesehatan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Fungsi :**

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang perizinan dan kelembagaan, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi, pemeriksaan, pengawasan, dan penilaian kesehatan koperasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perizinan dan kelembagaan, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi, pemeriksaan, pengawasan, dan penilaian kesehatan koperasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perizinan dan kelembagaan, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi, pemeriksaan, pengawasan, dan penilaian kesehatan koperasi; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

#### **'7. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mempunyai tugas pokok :

**Tugas :** membantu Kepala Disperindagkop dan UKM dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

**Fungsi :**

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
- d. pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **B. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Adapun kelompok Jabatan Fungsional yang ada pada Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo:

##### **1. Pengawas Koperasi Ahli Muda**

Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda merupakan salah satu jabatan fungsional yang ada dalam lingkup pengawasan koperasi di Indonesia. Jabatan ini memiliki kedudukan dan tanggung jawab profesional dalam pelaksanaan tugas pengawasan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Fungsi Jabatan Fungsional** dari **Pengawas Koperasi Ahli Muda** adalah:

Melaksanakan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan penerapan sanksi

**Tugas Pokok :**

1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
2. Melakukan penyusunan rencana kerja tahunan pengawasan koperasi
3. Menelaah rencana kerja tahunan pengawasan koperasi
4. Melakukan penyusunan rencana kerja bulanan pengawasan koperasi
5. Menelaah rencana kerja bulanan pengawasan koperasi

6. Melakukan reviu rencana program/kegiatan bulanan dan tahunan pengawas koperasi
7. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan kerja pengawasan koperasi
8. Menyusun dan mengidentifikasi keanggotaan tim pengawas koperasi
9. Melakukan koordinasi tim pengawasan koperasi internal dalam rangka persiapan pemeriksaan.
10. Melaksanakan analisis hasil pemeriksaan kepatuhan legal terhadap jati diri koperasi.
11. Melaksanakan analisis hasil pemeriksaan kepatuhan transaksi keuangan dan usaha koperasi.
12. Melaksanakan analisis hasil pemeriksaan kepatuhan usaha dan keuangan koperasi;
13. Melaksanakan analisis hasil pemeriksaan kelengkapan legalitas koperasi;
14. Melaksanakan analisis hasil pemeriksaan kelengkapan organisasi koperasi;
15. Melakukan analisis hasil pemeriksaan penghimpunan dana yang dilakukan oleh koperasi;
16. Melakukan analisis hasil pemeriksaan penyaluran dana yang dilakukan oleh koperasi;
17. Melakukan analisis hasil pemeriksaan keseimbangan dana dan kinerja keuangan koperasi;
18. Melakukan analisis hasil pengawasan terhadap kasus koperasi bermasalah;
19. Melakukan analisis hasil *audit sampling* terkait daftar koperasi bermasalah melalui *field audit* pra pengawasan;
20. Melakukan reviu *data analysis* terkait daftar koperasi bermasalah melalui *field audit* pra-pengawasan;
21. Melakukan analisis hasil preliminary analysis terkait data objek pengawasan koperasi;
22. Melakukan analisis hasil pengawasan koperasi di daerah terpencil atau terbelakang daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah yang mengalami bencana alam dan bencana social atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain;
23. Melaksanakan pembimbingan dalam pelaksanaan tindakan pengawasan khusus koperasi;
24. Melakukan reviu laporan hasil pengawasan kasus koperasi bermasalah;
25. Melakukan reviu hasil penyusunan laporan hasil pemeriksaan koperasi;
26. Melakukan reviu pemetaan hasil pemeriksaan koperasi;
27. Melakukan penyusunan rekomendasi hasil pengawasan koperasi;
28. Melakukan supervisi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan;
29. Mengusulkan rekomendasi penerapan sanksi administratif terhadap koperasi;
30. Melakukan supervisi pemantauan tindak lanjut penerapan sanksi administratif terhadap koperasi;
31. Mengusulkan rekomendasi penghapusan sanksi administratif koperasi;
32. Melakukan analisis hasil koordinasi pengawasan dengan instansi penegak hukum;
33. Melakukan supervisi pemberian keterangan dalam mendukung penyidikan tindak pidana yang melibatkan koperasi;
34. Melakukan tugas sebagai saksi di proses peradilan kasus koperasi;
35. Melakukan supervisi proses kesaksian di proses peradilan kasus koperasi;
36. Melaksanakan tugas sebagai ahli dalam penanganan kasus koperasi;
37. Melakukan reviu hasil penyusunan program pembimbingan dan pelatihan terhadap pengawas internal koperasi;
38. Melakukan reviu hasil penyusunan program pembimbingan dan pelatihan terhadap pengurus koperasi;

39. Melakukan reviu pembimbingan dan pelatihan terhadap pengawas internal koperasi;
40. Melakukan reviu pembimbingan dan pelatihan terhadap pengurus koperasi;
41. Melakukan supervise penilaian dan evaluasi terhadap pengawas internal koperasi;
42. Melakukan supervise penilaian dan evaluasi terhadap pengurus koperasi;
43. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan koperasi di tingkat provinsi;
44. Melaksanakan kerjasama pengawasan koperasi dengan institusi terkait; dan;
45. Melakukan supervisi kerjasama pengawasan koperasi dengan institusi terkait;

## **2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan**

Jabatan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan, secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Fungsi Jabatan Fungsional** dari **Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan** adalah:

Melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan

### **Tugas Pokok :**

1. Pendidikan dan pelatihan;
2. Menganalisis data potensi wilayah usaha indag;
3. Sebagai penyaji dalam diskusi konsep hasil identifikasi;
4. Sebagai narasumber dalam diskusi konsep hasil identifikasi;
5. Merumuskan alternative pemecahan masalah usaha indag;
6. Merumuskan kebutuhan penyuluhan usaha indag;
7. Sebagai narasumber dalam pembahasan faktor-faktor penentu;
8. Menyusun konsep program penyuluhan usaha indag;
9. Sebagai pembahas dalam diskusi konsep program penyuluhan usaha indag;
10. Mengolah dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan pedoman penyuluhan indag;
11. Menyusun konsep pedoman penyuluhan indag;
12. Sebagai penyaji diskusi konsep pedoman penyuluhan indag;
13. Sebagai pembahas diskusi konsep pedoman penyuluhan indag;
14. Merumuskan konsep pedoman penyuluhan indag;
15. Mengolah dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan juklak/juknis penyuluhan indag;
16. Menyusun konsep juklak/juknis penyuluhan indag;
17. Merumuskan konsep juklak/juknis penyuluhan indag;
18. Mengumpulkan dan mengolah bahan/data informasi bahan penyempurnaan kebijaksanaan;
19. Menyusun rencana kerja tahunan;
20. Menyusun materi penyuluhan bidang usaha indag;
21. Melakukan kunjungan tata muka/anjingsana kepada pengusaha bidang usaha indag;
22. Melakukan kunjungan tatap muka kepada kelompok usaha indag;
23. Sebagai moderator temu lapangan/temu wicara dengan usaha indag;
24. Menyusun proposal kegiatan temu wicara dengan usaha indag;
25. Menjadi penyaji dalam temu wicara dengan usaha indag;
26. Menyusun proposal temu bisnis dengan usaha indag;

27. Menyusun laporan hasil temu bisnis dengan usaha indag;
28. Sebagai narasumber kegiatan mimbar sarasehan bidang usaha indag;
29. Membuat materi/modul untuk pelatihan usaha indag kecil pasar modern;
30. Mengajar dalam pelatihan/kursus usaha indag kecil pasar modern;
31. Melakukan kegiatan penyuluhan melalui media elektronika radio;
32. Melakukan layanan jasa konsultasi usaha indag secara langsung;
33. Melakukan desiminasi teknologi baru usaha indag menengah;
34. Menyusun petunjuk informasi indag dalam bentuk media elektronika sound slide;
35. Membimbing analisis data penyusunan proposal usaha indag;
36. Menyusun rancangan studi kelayakan *business plan* (rancangan usaha);
37. Melakukan penelitian lapangan dalam rangka penyusunan studi kelayakan *business plan* (rancangan usaha);
38. Sebagai penyaji dalam presentasi rancangan studi kelayakan *business plan* (rancangan usaha);
39. Menyusun studi kelayakan *business plan* (rancangan usaha);
40. Membimbing penyusunan rencana tahunan usaha indag kecil pasar moder;
41. Bimbingan penerapan system manajemen mutu usaha indag kecil pasar modern;
42. Bimbingan penerapan manajemen lingkungan pengolah limbah fisika, kimia, sosekbid ISO-14000 bidang usaha indag kecil pasar modern;
43. Melakukan diagnose dalam rangka memberikan jasa konsultasi usaha indag;
44. Mengolah data hasil diagnosa dalam rangka memberikan jasa konsultasi usaha indag;
45. Melakukan sosialisasi ketentuan ekspor/impor;
46. Membimbing penyelesaian dokumen ekspor/impor;
47. Menyusun kerangka acuan dan studi AMDAL berdampak penting;
48. Menyusun dokumen AMDAL berdampak penting;
49. Membimbing calon wirausaha indag dan atau incubator;
50. Membuat evaluasi terbentuknya wirausaha baru indag daan atau incubator;
51. Mengolah data profil investasi;
52. Menyusun buku profil investasi;
53. Menyajikan informasi peluang pasar usaha indag;
54. Menyusun agenda permasalahan dalam rangka negosiator bisnis;
55. Menyusun laporan hasil negosiasi bisnis;
56. Pemasarakatan peraturan perundang-undangan dan system pengawasan;
57. Menyusun landasan (AD/ART)/ pedoman institusi usaha indag;
58. Menyusun katalog dan bahan promosi pameran indag;
59. Membuat laporan hasil pameran indag;
60. Menyusun rencana kegiatan evaluasi;
61. Sebagai pembahas diskusi konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan usaha indag;
62. Merumuskan laporan hasil pelaksanaan penyuluhan usaha indag;
63. Pengembangan profesi;
64. Mengikuti Seminar/Lokakarya dibidang Usaha Indag;

### 3. Penera Ahli Pertama

**Jabatan Fungsional Penera Ahli Pertama** adalah salah satu jenjang dalam jabatan fungsional **Penera**, yaitu pejabat fungsional yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan **pengukuran, penakaran, penimbangan, dan pengujian alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP)** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang metrologi legal.

**Fungsi Jabatan Fungsional** dari **Penera Ahli Pertama** adalah:

Melakukan pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera/ tera ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian UTTP dan pengelolaan Cap Tanda Tera.

**Tugas Pokok :**

1. Melakukan pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Massa;
2. Melakukan pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Panjang;
3. Melakukan pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Listrik dan Waktu Lainnya;
4. Melakukan pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Suhu;
5. Melakukan pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan Momen Gaya;
6. Melakukan pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Volume;
7. Melakukan pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran KLH;
8. Melakukan pengujian UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik dan atau Izin Tipe;
9. Pengelolaan Cap Tanda Tera

### C. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

#### 1. Pelaksanaan Tera/Tera Ulang alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP).

UPTD Metrologi dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 82 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis metrologi legal pada Dinas Perdagangan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 182 Tahun 2019 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 182).

Kegiatan tera/tera ulang UTTP adalah serangkaian proses pemeriksaan/pengujian oleh pegawai yang berhak dengan menandai baik tanda sah, tanda batal maupun surat keterangan tertulis berdasarkan hasil pengujian yang meliputi antara lain :

Ukuran, takaran, timbangan, perlengkapannya dan pengajuan. Kegiatan Tera/Tera ulang UTTP dilaksanakan oleh UPTD Kemeterologian dengan memberikan penyuluhan tentang kemeterologian, bimbingan, pelaksanaan tera, tera ulang dan Pos ukur ulang yang menjangkau semua wilayah Kabupaten Wajo. Adapun tujuan pelaksanaan tera/tera ulang UTTP yaitu untuk melindungi kepentingan umum (Produsen dan Konsumen ) dalam transaksi penerimaan barang dan jasa.

#### 2. Pelayanan UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi Sentra IKM.

UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi Sentra IKM dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 67 Tahun 2020 . UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi IKM merupakan unit pemeliharaan ulat sutera (hulu) hingga menghasilkan benang sutera/tenun sutera/tekstil

lainnya (hili) dan pusat pusat promosi bagi sentra IKM yang ada di daerah.

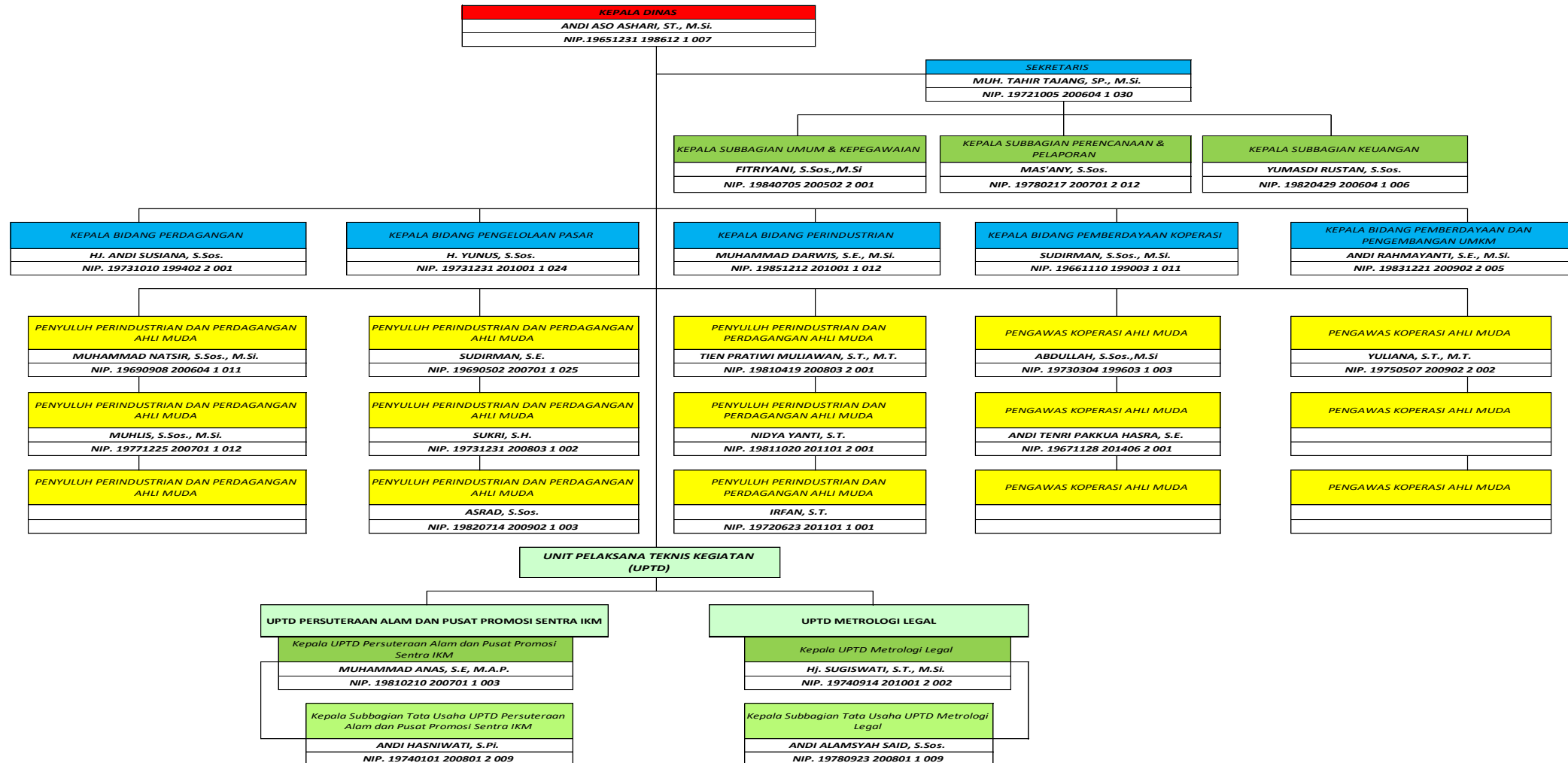
UPTD Persuteraan Alam dan Pusat promosi IKM dibentuk bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan Prduk Persuteraan Alam Daerah. Dimana jenis pelayanan yang akan dilakukan pelaksanaan teknis operasional pelayanan kegiatan pemeliharaan dan budidaya ulat sutera, pertenunan dan pengujian mutu sutera berupa kain atau benang, dan Promosi produk sutera para pelaku sentra IKM di daerah.

### **3. Pelayanan UPTD Pasar.**

Pelayanan UPTD Pasar dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Orgabisasi dan Tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pasar. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan teknis operasional bidang Pasar.

UPTD Pasar dibentuk bertujuan untuk **Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pasar** tradisional yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah , **Memberikan pelayanan publik yang lebih baik** kepada pedagang dan masyarakat pengguna pasar. **Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)** melalui optimalisasi retribusi pasar dan pengelolaan aset pasar. **Menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan pasar**, termasuk pengaturan zonasi pedagang, pengelolaan sampah, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar. **Mendorong pemberdayaan ekonomi lokal**, khususnya sektor informal dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). **Menjadi perpanjangan tangan dari Dinas Perdagangan atau Dinas terkait** dalam hal pengelolaan pasar di tingkat teknis operasional.

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 37 TAHUN 2023



## **SUMBER DAYA PD**

### **1. JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human Resources) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja dalam pencapaian hasil yang diinginkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo.

Sumber daya yang mempengaruhi kinerja organisasi antara lain mencakup sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana kerja. Oleh karena itu, maka Sumberdaya aparatur pada Dinas Perindagkop dan UKM berjumlah 54 orang PNS. PNS yang berkualifikasi pendidikan S2 sebanyak 18 orang, S1/D4 sebanyak 31 orang, SMU/SMK sebanyak 4 orang. Dari segi jenjang pendidikan PNS pada Dinas Perindagkop dan UKM rata-rata berpendidikan S1 dan S2, dan PNS yang berpendidikan SMU/SMK diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kemampuannya untuk meraih jenjang S1 agar lebih profesional dan cakap dalam pemerintahan.

Dari segi kepangkatan PNS lingkup Dinas Perindagkop dan UKM terdiri dari golongan IV sebanyak 11 orang, golongan III sebanyak 40 orang, golongan II sebanyak 5 orang . Sedangkan dari segi jabatan eselon, terdiri dari 1 orang eselon II, 1 orang eselon III A, 5 orang eselon III B , 6 Orang eselon IV A, 2 Orang Eselon V B, Pelaksana 32 Orang dan Fungsional 11 Orang dan Rata-rata yang memegang jabatan eselon telah mengikuti Diklat sesuai kepangkatannya sebanyak 66 orang PNS dan 165 orang Non PNS, dengan rincian sebagai berikut.

Adapun kualifikasi dari aparatur sumber daya manusia Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo. Kualifikasi SDM berdasarkan pendidikan formal menunjukkan keseimbangan yang memadai dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah Sarjana. Pengembangan kualitas SDM yang terkait dengan kepemimpinan dan keterampilan akan terus ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

**Tabel 1**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pangkat, Eselon, Dan Pendidikan Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Wajo**

NO. URUT	NAMA	NIP	Jenis Kelamin	PANGKAT		JABATAN		Eselon	TMT CPNS	MASA KERJA KESELURUHAN		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			Usia		KET.
				GOL	TMT	Nama	TMT			Thn	Bln	Nama	Bulan / Tahun	Jumlah jam	Tingkat Ijazah	Nama	Lulus Thn	Tempat	Tanggal lahir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	ANDI ASO ASHARI, S.T.,M.Si.	19651231 198612 1 007	L	IV/c	01-10-2022	Kepala Dinas	06-01-2023	II.b	01-12-1986	30	9	Diklatpim Tk.III	2007	360 Jam	S2	Manajemen Perkotaan	2002	Sengkang	31-12-1965	
2	H.J. ANDI SUSIANA, S.Sos.	19731010 199402 2 001	P	IV/a	01-10-2018	Kepala Bidang Perdagangan	06-06-2022	III.b	01-02-1994	26	7	-	-	-	S1	Ilmu Komunikasi	2001	Sengkang	10-10-1973	
3	SAHRIWATI, S.Sos.,M.Si.	19721102 199108 2 001	P	IV/a	01-10-2020	Penyuluh Koperasi	01-09-2020	-	01-08-1991	29	1	Diklatpim Tk.IV	2008	285 Jam	S2	Ilmu Administrasi	2018	Atapange	02-11-1972	
4	ABDULLAH, S.Sos., M.Si.	19730304 199603 1 003	L	IV/a	01-10-2020	Pengawas Koperasi Ahli Muda	30-12-2021	JF	01-03-1996	24	6	Diklatpim Tk.IV	2014	825 Jam	S2	Ilmu Administrasi	2010	Sengkang	04-03-1973	
5	MUHLIS, S.Sos., M.Si.	19771225 200701 1 012	L	IV/a	01-04-2021	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	30-12-2021	JF	01-01-2007	19	4	Diklatpim Tk.IV	2014	825	S2	Ilmu Administrasi	2014	Maroanging	25-12-1977	
6	ANDI TAQWA, S.T., M.Si.	19710926 199403 1 004	L	IV/a	01-04-2021	Pengelola Pasar	01-06-2023	-	01-03-1994	26	6	Diklatpim Tk.IV	2016	825 Jam	S2	Ilmu Administrasi	2011	Pompanua	26-09-1971	
7	INDAH SRIREJEKI TJARBO S, S.T., M.Si.	19790311 200502 2 003	P	IV/a	01-04-2021	Analisis Bahan dan Barang Teknik Logam	01-06-2022	-	01-02-2005	20	7	Diklatpim Tk.IV	2012	285 Jam	S2	Manajemen Perencanaan	2009	Ujung Pandang	11-03-1979	
8	MUH. TAHIR TAJANG, SP., M.Si.	19721005 200604 1 030	L	IV/a	01-10-2021	Sekretaris Dinas	11-01-2021	III.a	01-04-2006	30	5	Diklatpim Administrator	2023	908 Jam	S2	Ilmu Administrasi	2011	Pattirosomp e	05-10-1972	
9	MUHAMMAD NATSIR, S.Sos., M.Si.	19690908 200604 1 011	L	IV/a	01-04-2022	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	30-12-2021	JF	01-04-2006	26	5	Diklatpim Tk.IV	2013	285 jam	S2	Ilmu Administrasi	2012	Sengkang	08-09-1969	
10	MAYA ASRIANTI, S.P.,M.Si.	19780426 200701 2 016	P	IV/a	01-04-2023	Kepala UPT Pasar	16-07-2024	IV.a	01-01-2007	17	3	Diklatpim Tk.IV	2014	825 jam	S2	Ilmu Administrasi	2012	Siengkang	26-04-1978	
11	FITRIYANI, S.Sos.,M.Si.	19840705 200502 2 001	P	IV/a	01-10-2023	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	06-08-2021	IV.a	01-02-2005	15	7	Diklat Pim Tk.IV	2012	285 jam	S2	Ilmu Administrasi	2018	Ujung Pandang	05-07-1984	
12	H. YUNUS, S.Sos., M.Si.	19731231 201001 1 024	L	IV/a	01-04-2025	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar	11-01-2021	III.b	01-01-2010	16	6	-	-	-	S2	Ilmu Administrasi	2016	Tempe	31-12-1973	
13	Hj. SUGISWATI, S.T., M.Si.	19740914 201001 2 002	P	IV/a	01-04-2025	Kepala UPTD Metrologi Legal	31-03-2023	IV.a	01-01-2010	22	5	-	-	-	S2	Ilmu Administrasi	2018	Siwa	14-09-1974	
14	MUHAMMAD ANAS, S.E., M.A.P	19810210 200701 1 003	L	IV/a	01-04-2025	Kepala UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi Sentra IKM	31-03-2023	IV.a	01-01-2007	18	3	Diklat Pim Tk.IV	2017	585 jam	S2	Administrasi Publik	2020	Jambi	10-02-1981	
15	SYAMSUL HUDA, S.Pt.	19681015 199803 2 007	P	III/d	01-10-2007	Analisis Pengembangan Usaha Agro Industri	02-05-2020	-	01-03-1998	27	6	Diklatpim Tk.IV	2004	285 Jam	S1	Peternakan	1992	Siwa	15-10-1968	

16	SUKRI, S.H.	19731231 200803 1 002	L	III/d	01-04-2018	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	30-12-2021	JF	01-03-2008	17	6	-	-	-	S1	Ilmu Hukum	1999	Bulu Patila	31-12-1973	
17	ANDI HASNIWATI, S.Pi.	19740101 200801 2 009	P	III/d	01-10-2018	Kepala Subbagian TU UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi Sentra IKM	06-08-2021	IV.b	01-01-2008	21	2	Diklatpim Tk.IV	2015	825 Jam	S1	Budidaya Perairan	1998	Paria	01-01-1974	
18	SUDIRMAN, S.E.	19690502 200701 1 025	L	III/d	01-10-2020	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	30-12-2021	JF	01-01-2007	21	3	-	-	-	S1	Manajemen	2004	Lagosi	02-05-1969	
19	SUTERIANDA, S.Sos	19711009 200701 2 016	P	III/d	01-10-2020	Bendahara	01-05-2021	-	01-01-2007	20	1	-	-	-	S1	Ilmu Pemerintahan	2003	Sengkang	09-10-1971	
20	TIEN PRATIWI MULIAWAN, S.T., M.T.	19810419 200803 2 001	P	III/d	01-04-2020	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	30-12-2021	JF	01-03-2008	17	6	Diklat Pim Tk.IV	2015	825 jam	S2	Teknik Kimia	2019	Ujung Pandang	19-04-1981	
21	YULIANA, S.T., M.T.	19750507 200902 2 002	P	III/d	01-04-2021	Pengawas Koperasi Ahli Muda	30-12-2021	JF	01-02-2009	16	7	Diklat Pim Tk.IV	2017	585 jam	S2	Teknik Kimia	2016	Siwa	07-05-1975	
22	ANDI RAHMAYANTI, S.E., M.Si.	19831221 200902 2 005	P	III/d	01-10-2021	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	01-04-2021	III.b	01-02-2009	16	2	-	-	-	S2	Ilmu Administrasi	2013	Sengkang	21-12-1983	
23	Hj. VITA PUSPITARIA RAUF, S.Sos.	19760407 200701 2 024	P	III/d	01-10-2021	Analisis Industri	02-03-2020	-	01-01-2007	17	2	-	-	-	S1	Ilmu Administrasi Negara	1998	Bandung	07-04-1976	
24	A. ABD. WARIS YUNUS, S.E., M.A.P.	19750122 201001 1 006	L	III/d	01-04-2022	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi	24-01-2025	III.b	01-01-2010	15	8	-	-	-	S2	Administrasi Publik	2021	Watampone	22-01-1975	
25	MAS'ANY, S.Sos.	19780217 200701 2 012	P	III/d	01-04-2022	Kepala Subbagian Perencanaan	06-01-2020	IV.a	01-01-2007	15	8	-	-	-	S1	Ilmu Pemerintahan	2009	Kaca, Soppeng	17-02-1978	
26	Hj. HARTATI, S.Sos.	19770605 201001 2 003	P	III/d	01-04-2022	Pengelola Data	02-01-2020	-	01-01-2010	15	8	-	-	-	S1	Ilmu Administrasi Negara	2000	Salobulo	05-06-1977	
27	BESSE HERAWATI, S.E.	19791231 201001 2 009	P	III/d	01-04-2022	Bendahara	02-01-2020	-	01-01-2010	15	8	-	-	-	S1	Akuntansi	2004	Liu	31-12-1979	
28	NIDYA YANTI, S.T.	19811020 201101 2 001	P	III/d	01-04-2023	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	30-12-2021	JF	01-01-2011	14	8	-	-	-	S2	Teknik Kimia	2019	Watampone	20-10-1981	
29	IRFAN, S.T.	19720623 201101 1 001	L	III/d	01-04-2023	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	30-12-2021	JF	01-01-2011	17	1	-	-	-	S1	Teknik Prosesing	1999	Makassar	23-06-1972	
30	ANDI ALAMSYAH SAID, S.Sos.	19780923 200801 1 009	L	III/d	01-04-2023	Kepala Subbagian TU UPTD Metrologi Legal	01-04-2021	IV.b	01-01-2008	16	1	-	-	-	S1	Administrasi Negara	2009	Sengkang	23-09-1978	
31	ASRAD, S.Sos.	19820714 200902 1 003	L	III/d	01-10-2023	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	30-12-2021	JF	01-02-2009	16	6	-	-	-	S1	Ilmu Administrasi Negara	2010	Sengkang	14-07-1982	

32	HENDRA, S.Sos	19780318 200801 1 009	L	III/d	01-10-2023	Pengelola Pasar	08-01-2024	-	01-01-2008	17	3	-	-	-	S1	Ilmu Pemerintahan	2010	Sengkang	18-03-1978	
33	YUMASDI RUSTAN, S.Sos.,M.M.	19820429 200604 1 006	L	III/d	01-04-2025	Kepala Subbagian Keuangan	06-01-2023	IV.a	01-04-2006	14	5	-	-	-	S2	Manajemen	2023	Surae	29-04-1982	
34	ROY ARMAN, S.Sos.	19810725 200801 1 005	L	III/c	01-04-2018	Pengelola Pasar	05-08-2021	-	01-01-2008	17	3	-	-	-	S1	Ilmu Pemerintahan	2010	Bone	25-07-1981	
35	PAISAL, ST	19770927 201001 1 002	L	III/c	01-10-2020	Pengelola Pasar	01-07-2022	-	01-01-2010	15	8	-	-	-	S1	Teknik Telekomunikasi dan Elektronika	2007	Ujung Pandang	27-09-1977	
36	ST. FATIMAH, S.T.	19791018 201406 2 001	P	III/c	01-10-2021	Instruktur Tekstil	27-07-2023	-	01-06-2014	20	8	-	-	-	S1	Teknik Elektro	2002	Makassar	18-10-1979	
37	SITTI HAWA ALIMIN, S.E.	19831010 201001 2 021	P	III/c	01-04-2021	Pengelola Data	01-12-2021	-	01-01-2010	15	8	-	-	-	S1	Manajemen	2010	Tempe	10-10-1983	
38	MUHAMMAD SYAHRIR, S.Sos.	19790409 200701 1 012	L	III/c	01-10-2021	Analisis Kinerja	01-06-2023	-	01-01-2007	19	4	-	-	-	S1	Ilmu Administrasi Negara	2013	Gowa	09-04-1979	
39	ANDI ASMIRAH, S.E.	19811206 200701 2 008	P	III/c	01-10-2021	Pengelola Data	02-06-2020	-	01-01-2007	17	3	-	-	-	S1	Manajemen	2011	Sengkang	06-12-1981	
40	HERNAWATI, S.Sos.	19680107 200801 2 007	P	III/c	01-10-2021	Pengelola Surat	01-07-2022	-	01-01-2008	17	3	-	-	-	S1	Ilmu Pemerintahan	2009	Tosora	07-01-1968	
41	SURBY YANTO, S.E.	19830417 200902 1 003	L	III/c	01-04-2022	Pengelola Pasar	02-01-2020	-	01-02-2009	15	11	-	-	-	S1	Manajemen	2008	Sumatera Selatan	17-04-1983	
42	ANSAR ALA, S.T.	19790309 201502 1 001	L	III/c	01-04-2023	Penera	01-04-2021	-	01-02-2015	10	7	-	-	-	S1	Teknik Industri	2006	Kalola	09-03-1979	
43	IRNAWATI ADMAJAYA PUSPITA, S.ST.	19910809 201502 2 001	P	III/c	01-04-2023	Pengelola Kepegawaian	02-01-2020	-	01-02-2015	10	7	-	-	-	D4	Akuntansi Manajerial	2013	Mallanroe	09-08-1991	
44	MUZDALIFAH H.A, S.T.	19950419 201902 2 001	P	III/b	01-10-2023	Penera Ahli Pertama	01-01-2021	-	01-02-2019	6	7	-	-	-	S1	Teknik Industri	2017	Ujung Pandang	19-04-1995	
45	ANTON, S.Sos.	19680401 200701 1 036	L	III/b	01-04-2025	Pengelola Pasar	01-05-2021	-	01-01-2007	17	11	-	-	-	S1	Ilmu Komunikasi	2013	Pinrang	01-04-1968	
46	ANDI FAISYAH HARMONI	19710720 200604 2 023	P	III/a	01-10-2021	Pengelola Gaji	01-05-2021	-	01-04-2006	22	4	-	-	-	S1	Administrasi Publik	2020	Sengkang	20-07-1971	
47	AMBO ASSE, S.H.	19760102 200801 1 010	L	III/a	01-04-2022	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	01-03-2023	-	01-01-2008	18	5	-	-	-	S1	Ilmu Hukum	2014	Sengkang	02-01-1976	
48	HASLINDAH, S.A.P.	19860322 201406 2 001	P	III/a	01-04-2024	Pengelola Distribusi dan Pemasaran	01-04-2021	-	01-06-2014	15	8	-	-	-	S1	Administrasi Publik	2023	Siwa	22-03-1986	
49	BASIR BRATA	19681027 200604 1 005	L	II/d	01-10-2018	Pengelola Pasar	01-05-2021	-	01-06-2004	25	5	-	-	-	SMA	Ilmu Sosial	1991	Pare-Pare	27-10-1968	
50	ANDI BASO M. IDRUS	19780525 200801 1 013	L	II/d	01-04-2020	Pengelola Pasar	01-05-2021	-	01-01-2008	16	2	-	-	-	SMA	IPS	1999	Wajo	25-05-1978	
51	DENI UNTUNG	19851217 201001 1 010	L	II/b	01-08-2024	Juru Pungut Retribusi	02-01-2020	-	01-01-2010	14	8	-	-	-	SMA	Ilmu Sosial	2005	Sengkang	17-12-1985	
52	ANDI BASO A.M	19690806 200701 1 039	L	II/a	01-07-2008	Juru Pungut Retribusi	02-01-2020	-	01-01-2007	20	10	-	-	-	SMA		1999	Sengkang	06-08-1969	
53	WULANDARI PRIANA, S.T.	19960719 202506 2 001	P	CPNS	01-06-2025	Konsultan Industri	01-06-2025	-	01-06-2025	0	3	-	-	-	S1	Teknik Industri	2017	Sengkang	19-07-1996	

Sumber data: Sekretariat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2025

## 1.1 Kondisi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

**Table 1.1 SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan (ASN)**

SUMBER DAYA MANUSIA								
SMP		SMA		S1/D4		S2		Jumlah
L	P	L	P	L	P	L	P	
0	0	4	0	14	17	9	9	53

**Table 1.2. SDM Berdasarkan Spesialisasi Pendidikan (ASN)**

Ekonomi dan Akuntansi		Pemerintahan, Administrasi dan Manajemen		Hukum		Pertanian dan Kehutanan		Teknik		Lainnya		Jumlah
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
0	2	19	13	2	0	0	0	3	6	5	3	53

**Table 1.3. SDM Berdasarkan Jabatan (ASN)**

ESELON II		ESELON III		ESELON IV		PELAKSANA		FUNGSIONAL		Jumlah
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	0	3	2	3	5	12	15	8	4	53

Sumber data: Sekretariat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2025

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah ASN pada Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab.Wajo berdasarkan Pangkat dan Eselon sebanyak 53 Orang.
2. Bahwa jumlah SDM berdasarkan gender, kondisi SDM dari tingkat Jabatan masih didominasi oleh Laki-Laki dengan jumlah Laki-Laki dengan jumlah 27 Orang dan Perempuan dengan jumlah 26 Orang
3. Jumlah SDM Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo berdasarkan tingkat pendidikan dapat disebut baik dengan rata-rata tingkat pendidikan SMA dengan jumlah 4 Orang, dimana Laki-Laki sebanyak 4 orang dan Perempuan tidak ada. Tingkat Pendidikan S1/D4 sebanyak 31 dengan jumlah Laki-laki sebanyak 14 orang dan Perempuan sebanyak 17 Orang dan untuk tingkat pendidikan S2 sebanyak 18 Orang dengan jumlah Laki-laki sebanyak 9 orang dan Perempuan sebanyak 9 orang. Jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikan dengan jumlah sebanyak 53 Orang dimana masih didominasi oleh Laki-Laki ;
4. Berdasarkan spesialisasi pendidikan sesuai dengan jurusan atau keahlian yang terdiri dari ; Ekonomi dan Akuntansi sebanyak 2 orang Laki-laki 0 dan perempuan 2 orang, Jurusan Pemerintahan, Administrasi dan Manajemen sebanyak 32 orang dengan jumlah Laki-laki sebanyak 19 orang dan Perempuan sebanyak 13 orang. Jurusan Hukum sebanyak 2 orang dengan jumlah Laki-Laki sebanyak 2 orang dan Perempuan 0 orang. Jurusan Teknik sebanyak 9 Orang dengan jumlah Laki-laki sebanyak 3 orang dan Perempuan sebanyak 6 orang. Dan lainnya sebanyak 8 orang dengan jumlah Laki-laki sebanyak 5 orang dan perempuan 3 orang.
5. Jumlah SDM Berdasarkan jabatan dimana terdiri dari: Eselon II sebanyak 1 orang Eselon III sebanyak 5 Orang, Eselon IV sebanyak 8 Orang, Pelaksana sebanyak 27 Orang dan Fungsional sebanyak 12 Orang.

## 1.2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Dinas Perndagkop dan UKM Kabupaten Wajo, dimana terdapat sebanyak 57 orang yang menurut jenis kelamin terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 19 Orang (33,33%) dan perempuan sebanyak 38 orang (66,66%).

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah PPPK dan PPPK Paruh Waktu menurut jenis kelamin di Dinas Dinas Perndagkop dan UKM Kabupaten Wajo Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.2**

**JUMLAH PPPTK DAN PPTK PARUH WAKTU MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2025 PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KAB.WAJO**

No	Status Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	PPPTK	0	2	2
2	PPPTK Paruh Waktu	19	36	55
	<b>Jumlah SDM</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>57</b>

Sumber Data : Sekretariat Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo

**Tabel 1.3**

**JUMLAH PPPTK DAN PPTK PARUH WAKTU MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2025  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KAB.WAJO**

No	Status Pegawai	Pendidikan				Jumlah
		S2	S1	D3	SMU	
1	PPPTK	-	2	-	-	2
2	PPPTK Paruh Waktu	-	23	-	32	55
	<b>Jumlah SDM</b>	-	<b>25</b>	-	<b>32</b>	<b>57</b>

Sumber Data : Sekretariat Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo

**SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan (PPPK )**

SUMBER DAYA MANUSIA								
SMP		SMA		S1/D4		S2		Jumlah
L	P	L	P	L	P	L	P	
0	0	0	0	0	2	0	0	2

**SDM Berdasarkan Spesialisasi Pendidikan (PPPK)**

Ekonomi dan Akuntansi		Pemerintahan, Administrasi dan Manajemen		Hukum		Pertanian dan Kehutanan		Teknik		Lainnya		Jumlah
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2

**SDM Berdasarkan Jabatan (PPPK)**

ESELON II		ESELON III		ESELON IV		PELAKSANA		FUNGSIONAL		Jumlah
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2

Sumber data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2025

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah PPTK pada Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab.Wajo sebanyak 2 Orang.
2. Bahwa jumlah SDM berdasarkan gender, kondisi SDM dari tingkat Jabatan masih didominasi oleh Perempuan dengan jumlah Laki-Laki dengan jumlah tidak ada Orang dan Perempuan dengan jumlah 2 Orang
3. Jumlah SDM PPPTK Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo berdasarkan tingkat pendidikan dapat disebut baik dengan rata-rata tingkat pendidikan S1 dengan jumlah 2 Orang, dimana Laki-Laki sebanyak Tidak ada orang dan Perempuan 2orang.

4. Berdasarkan spesialisasi pendidikan sesuai dengan jurusan atau keahlian yang terdiri dari ; Ekonomi dan Akuntansi sebanyak 1 orang perempuan,. Jurusan Teknik sebanyak 1 Orang Perempuan.
5. Jumlah SDM Berdasarkan jabatan dimana terdiri dari Pelaksana sebanyak 2 Orang Perempuan.

## Sumber Daya Manusia (SDM ) PPPTK PARUH WAKTU

### SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan (PPPTK PW )

SUMBER DAYA MANUSIA								
SMP		SMA		S1/D4		S2		Jumlah
L	P	L	P	L	P	L	P	
0	0	14	18	5	18	0	0	55

### SDM Berdasarkan Spesialisasi Pendidikan (PPPTKPW)

Ekonomi dan Akuntansi		Pemerintahan, Administrasi dan Manajemen		Hukum		Pertanian dan Kehutanan		Teknik		Lainnya		Jumlah
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
0	0	3	14	2	2	0	0	0	0	14	20	55

**Sumber data :** Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2025

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah PPPTK Paruh Waktu pada Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab.Wajo sebanyak 55 Orang.
2. Bahwa jumlah SDM berdasarkan gender, kondisi SDM dari tingkat Jabatan masih didominasi oleh Perempuan dengan jumlah Laki-Laki sebanyak 19 Orang dan Perempuan dengan jumlah 36 Orang
3. Jumlah SDM PPPTK Paruh Waktu Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo berdasarkan tingkat pendidikan dapat disebut baik dengan rata-rata tingkat pendidikan SMA dengan jumlah 32 Orang, dimana Laki-Laki sebanyak 14 orang dan Perempuan 18orang. S1/D4 dengan jumlah 23 Orang, dimana Laki-Laki sebanyak 5 orang dan Perempuan 18orang
4. Berdasarkan spesialisasi pendidikan sesuai dengan jurusan atau keahlian yang terdiri dari ; Pemerintahan, Administrasi dan Manajemen sebanyak 17 orang dimana Laki-Laki sebanyak 3 orang dan perempuan 14 Orang ,. Jurusan Hukum sebanyak 4 Orang dimana Laki-Laki sebanyak 2 Orang dan Perempuan 2 Orang. Dan Lainnya sebanyak 34 Orang dimana Laki-Laki sebanyak 14 Orang dan Perempuan sebanyak 20 Orang.

**JUMLAH TENAGA NON PNS TAHUN 2025  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KAB.WAJO**

No	Jabatan	Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
			L	P	
1	Sopir	SMA	1	0	1
2	Caraka	-	0	0	0
3	Kolektor	SD - SMA	52	10	62
4	Cleaning Service	SMA	0	2	2
	<b>Jumlah SDM</b>		<b>53</b>	<b>12</b>	<b>65</b>

Sumber data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2025

### **Sarana dan Prasarana Organisasi**

Sejalan dengan jumlah anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo dari segi jumlah sarana dan prasarana belum memadai. Sehingga peningkatan kualitas dan kuantitas dari tahun ke tahun perlu mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan kinerja. Berdasarkan pertimbangan kebutuhan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo masih membutuhkan tambahan ruangan tempat kerja, ruang arsip dan gudang.

Adapun sumber daya sarana dan prasaran kerja yang dimiliki Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM saat ini seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini

**Tabel 4**  
**SARANA DAN PRASARANA**  
**PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**  
**KABUPATEN WAJO**  
**Sarana dan Prasarana**  
**Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo**

NO.	NAMA/ JENIS BARANG	VOLUME/ SATUAN	TAHUN PENGADAAN	KONDISI
1	Tanah bangunan rumah negara Gol II	1	1965	BAIK
2	Tanah bangunan rumah negara Gol II	1	1982	BAIK
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1988	BAIK
4	PASAR SENTRAL SENGKANG	1	1995	BAIK
5	PASAR MINI I TOKAMPU	1	-	BAIK
6	PASAR TEMPE	1	-	BAIK
7	PASAR TANCUNG	0	-	BAIK
8	PASAR LAJOKKA	1	-	BAIK
9	PASAR IMPA-IMPA	1	-	BAIK
10	PASAR INPRES ABBANUA	1	-	BAIK
11	PASAR INPRES GILIRENG	1	-	BAIK
12	PASAR BELAWA	1	-	BAIK
13	PASAR TOSORA	1	-	BAIK
14	PASAR SIWA	1	-	BAIK
15	PASAR BURIKO	1	-	BAIK
16	PASAR KALUKU	1	-	BAIK
17	PASAR KEERA	1	-	BAIK
18	PASAR JALANG	1	-	BAIK
19	PASAR DOPING	1	-	BAIK
20	PASAR SALOBULO	1	-	BAIK
21	PASAR PENEKI	1	-	BAIK
22	PASAR SOLO	1	-	BAIK
23	PASAR INPRES KAMPIRI	1	-	BAIK
24	PASAR MAROANGING	1	-	BAIK
25	PASAR SALOJAMPU	1	-	BAIK
26	PASAR BARU ANABANUA	1	-	BAIK
27	PASAR ATTAPANGE	1	-	BAIK
28	PERTOKOAN PALLAWARUKKA	1	-	BAIK
29	Pusat Pertokoan Sengkang	1	-	BAIK
30	PASAR CELLU'E	1	-	BAIK

31	PASAR SOROH	1	-	BAIK
32	Pasar Inpres	1	-	BAIK
33	Pasar Inpres Belawa	1	-	BAIK
34	Pasar MattirowaliE	1	-	BAIK
35	LOKASI PASAR ABBANDERANGNGE	1	2001	BAIK
36	Pasar Lompoloang	1	2001	BAIK
37	PASAR BULU SIMPELLU	1	-	BAIK
38	PASAR LABAWANG	1	2001	BAIK
39	PASAR TANETE DESA AWOTA DUSUN JONGA-JONGA	1	-	BAIK
40	PASAR KOMPLEKS KALUKU	1	-	BAIK
41	Pasar Wele	1	2019	BAIK
42	Tanah bangunan rumah	1	1960	BAIK
43	Tanah kosong yang sudah	1	1972	BAIK
44	Tanah bangunan Industri	1	2003	BAIK
45	Tanah Bangunan Perumahan	1	1980	BAIK
46	TANAH LAHAN PENGSTRAAN DESA TOSORA KEC. MAJALENG	1	2020	BAIK
47	Ganti Rugi Tanah Pasar Gilireng	1	2009	BAIK
48	Pembayaran Ganti Rugi / Pelepasan Hak atas Tanah Tambahan Lokasi Pasar Tancung Kel. Pinceng Pute Kec. Tanasitolo Kab. Wajo dengan Luas 379 M2 X Rp. 625.000,-	1	2016	BAIK
49	Pembayaran Ganti Rugi / Pelepasan Hak atas Tanah Tambahan Lokasi Pasar Tancung Kelurahan Pinceng Pute Kec. Tanasitolo Kab. Wajo An H. Meru atau ahli Warisnya / Kuasanya	1	2016	BAIK
50	Pembayaran Ganti Rugi / Pelepasan Hak atas Tanah Lokasi Pasar Tancung Kelurahan Pinceng Pute Kec. Tanasitolo Kab. Wajo An. Sirajuddin / Ahli Warisnya / Kuasanya	1	2016	BAIK
51	Pembayaran Ganti Rugi / Pelepasan Hak atas Tanah Lokasi Pembangunan Pasar Tancung Kel. Pinceng Pute Kec. Tanasitolo Kab. Wajo An. H. Mansur / ahli Warisnya Kuasanya	1	2016	BAIK
52	Ganti rugi Pengadaan tanah lokasi Pembangunan Pasar Desa Pattangnga Kec. Bola	1	2019	BAIK
53	Lapangan Sepak Bola Gilireng	1	2021	BAIK
54	TANAH LAHAN PASAR RAKYAT SALOPOKKO DESA UGI KECAMATAN SABBANGPARU	1	2023	BAIK
55	PASAR RAKYAT BURIKO	1	2022	BAIK
56	Sepeda Motor	1	2006	BAIK
57	Sepeda Motor	1	2006	BAIK
58	Sepeda Motor	1	2006	BAIK
59	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
60	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
61	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
62	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
63	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
64	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
65	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
66	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
67	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
68	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
69	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
70	Sepeda Motor	1	2007	BAIK

71	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
72	Sound system	8	2003	BAIK
73	Lemari buku 2 pintu / lemari kayu	3	2007	BAIK
74	Kulkas	1	2008	BAIK
75	Dinamo air	1	2008	BAIK
76	Meja Kerja	13	2009	BAIK
77	Kursi Kerja	13	2009	BAIK
78	Kulkas	1	2011	BAIK
79	Lemari Arsip	1	2012	BAIK
80	Alat Uji Pompa Ukur BB Blnj Kls III KAP.L5.10, 20 Ltr	1	2012	BAIK
81	Anak Timbangan Bidur Kls M2 Masing-Masing Kapt. 20 kg	1	2012	BAIK
82	Bourje Untuk memeriksa takaran 1/2 ltr - 10 ltr	1	2012	BAIK
83	Anak Timbangan Bidur Kls M2 Massal Nominal 1 mg-10kg dan 20 K	1	2012	BAIK
84	Anak Timbangan Bidur Kls F2 Massal Nominal 1 mg-10kg dan 20 K	1	2012	BAIK
85	Cap Tera/Tera Ulang	1	2012	BAIK
86	Anak Timbangan Kls M2 untuk Rem Massal Nominal 1 g - 1 Kg	1	2012	BAIK
87	Anak Timbangan Kls M2 untuk Dacing Massa Nominal 5 kg - 20Kg	1	2012	BAIK
88	Meja Sidang Tera/Tera Ulang Masing-Masing 3 Bulan	1	2012	BAIK
89	Mesin Genset	1	2013	BAIK
90	Tenda Pameran	24	2013	BAIK
91	Laptop	1	2014	BAIK
92	Peralatan dan Mesin - Lap Top	1	2015	BAIK
93	Peralatan dan Mesin - Line Printer	1	2015	BAIK
94	Peralatan dan Mesin - Sepeda Motor	1	2016	BAIK
95	Peralatan dan Mesin - Sepeda Motor	1	2016	BAIK
96	Peralatan dan Mesin - Sepeda Motor	1	2016	BAIK
97	Peralatan dan Mesin - Sepeda Motor	1	2016	BAIK
98	Peralatan dan Mesin - Sepeda Motor	1	2016	BAIK
99	Peralatan dan Mesin - Sepeda Motor	1	2016	BAIK
100	Peralatan dan Mesin - Sepeda Motor	1	2016	BAIK
101	Peralatan dan Mesin - Sepeda Motor	1	2016	BAIK
102	Peralatan dan Mesin - Sepeda Motor	1	2016	BAIK
103	Peralatan dan Mesin - Lap Top	2	2016	BAIK
104	SEPEDA MOTOR	1	2005	BAIK
105	AC Unit	8	2017	BAIK
106	Wireless	1	2017	BAIK
107	P.C Unit/ Komputer PC	4	2017	BAIK
108	Printer	3	2017	BAIK
109	Proyektor + Attachment	1	2017	BAIK
110	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	7	2017	BAIK
111	Filling Besi/Metal	2	2017	BAIK
112	Sofa	1	2017	BAIK
113	Kursi Tamu	2	2017	BAIK
114	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	2017	BAIK
115	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	2017	BAIK
116	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2017	BAIK
117	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	2017	BAIK
118	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	2017	BAIK
119	Alat Timbangan Lain-lain	1	2017	BAIK
120	Alat Timbangan Lain-lain	1	2017	BAIK

121	Termometer Standard	1	2017	BAIK
122	Timbangan Elektronik	1	2017	BAIK
123	Timbangan Elektronik	1	2017	BAIK
124	Timbangan Elektronik	1	2017	BAIK
125	Tool Set	1	2017	BAIK
126	Meja Kerja	1	2017	BAIK
127	Alat Uji Diameter	1	2017	BAIK
128	Anak Timbangan	1	2017	BAIK
129	Kursi Rapat	60	2018	BAIK
130	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	2018	BAIK
131	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	2018	BAIK
132	AC Split	2	2018	BAIK
133	P.C Unit/ Komputer PC	3	2018	BAIK
134	CCTV	1	2018	BAIK
135	Jeep	1	2018	BAIK
136	Forklift	1	2003	BAIK
137	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
138	Kursi kayu	15	2003	BAIK
139	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	2003	BAIK
140	Filling Besi/Metal	2	2003	BAIK
141	Meja Rapat	1	2003	BAIK
142	Meja Rapat Pimpinan	1	2003	BAIK
143	Kursi Rapat Pimpinan	6	2003	BAIK
144	Meja 1/2 Biro	5	2003	BAIK
145	Lemari Es	2	2003	BAIK
146	Meja Rias	8	2003	BAIK
147	Lemari Rak	2	2003	BAIK
148	Lemari Pakaian	8	2003	BAIK
149	Lemari Makan	2	2003	BAIK
150	Kursi Tamu	2	2003	BAIK
151	White Board	1	2003	BAIK
152	Meja Biro	1	2006	BAIK
153	Meja 1/2 Biro	1	2006	BAIK
154	Brand Kas	1	2007	BAIK
155	Meja Rapat	1	2007	BAIK
156	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	2007	BAIK
157	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	2007	BAIK
158	Meja Dan bangku Kerja	1	2007	BAIK
159	Lemari Bahan	1	2007	BAIK
160	Papan Sentra	4	2007	BAIK
161	ATBM Lengkap Dengan Isinya	1	2007	BAIK
162	Alat Tenun Gedogan Lengkap Dengan Isinya	1	2007	BAIK
163	Alat Pemintalan Lengkap Dengan Isinya	1	2007	BAIK
164	Alat Twis Benang	1	2007	BAIK
165	Alat Pemipit Jagung	6	2008	BAIK
166	Televisi	1	2008	BAIK
167	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	2008	BAIK
168	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	2008	BAIK
169	Lemari Arsip	1	2008	BAIK
170	Alat pemintal Benang	1	2008	BAIK
171	Mesin Bordir	1	2008	BAIK
172	Peralatan dan Mesin - P.C Unit/ Komputer PC	1	2015	BAIK
173	Peralatan dan Mesin - ATBM	5	2015	BAIK
174	Peralatan dan Mesin - Printer	2	2015	BAIK
175	Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Lain-lain	1	2016	BAIK
176	Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium Lain-lain	1	2016	BAIK
177	Peralatan dan Mesin - Lemari Kaca	3	2016	BAIK
178	Peralatan dan Mesin - Lemari Besi	1	2016	BAIK
179	Peralatan dan Mesin - Lemari Penyimpanan	6	2016	BAIK
180	Peralatan dan Mesin - Kursi Kerja	4	2016	BAIK

181	Peralatan dan Mesin - Kursi Tamu	1	2016	BAIK
182	Peralatan dan Mesin - Lap Top	2	2016	BAIK
183	Peralatan dan Mesin - Meja Kerja	4	2016	BAIK
184	P.C Unit/ Komputer PC	4	2017	BAIK
185	Lap Top	3	2017	BAIK
186	Printer	1	2017	BAIK
187	Proyektor + Attachment	1	2017	BAIK
188	Sound System	1	2017	BAIK
189	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	5	2017	BAIK
190	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	2017	BAIK
191	Meja Kerja	5	2017	BAIK
192	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2017	BAIK
193	Kursi Kerja	24	2017	BAIK
194	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	5	2017	BAIK
195	Papan Visual	1	2017	BAIK
196	AC Split	2	2017	BAIK
197	Alat Lab. Proses Industri Lain-Lain	1	2017	BAIK
198	Binocular Microscope	1	2017	BAIK
199	Alat Lab. Proses Industri Lain-Lain	1	2017	BAIK
200	Alat Lab. Proses Industri Lain-Lain	1	2017	BAIK
201	Alat Lab. Proses Industri Lain-Lain	1	2017	BAIK
202	Alat Lab. Proses Industri Lain-Lain	1	2017	BAIK
203	Alat Lab. Proses Industri Lain-Lain	1	2017	BAIK
204	Alat Lab. Proses Industri Lain-Lain	1	2017	BAIK
205	Alat Lab. Proses Industri Lain-Lain	1	2017	BAIK
206	TV Monitor	2	2017	BAIK
207	TV Monitor	1	2017	BAIK
208	Handy Cam	1	2017	BAIK
209	Mesin Cacah	1	2017	BAIK
210	AC Split	5	2017	BAIK
211	Sepeda Motor	1	2017	BAIK
212	Sepeda Motor	1	2017	BAIK
213	Sepeda Motor	1	2017	BAIK
214	Sepeda Motor	1	2017	BAIK
215	Sepeda Motor	1	2017	BAIK
216	Mesin Kompresor	1	2018	BAIK
217	Alat Ukur/Pembanding Lain-lain	1	2018	BAIK
218	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	2018	BAIK
219	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	2018	BAIK
220	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	2018	BAIK
221	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10	2018	BAIK
222	P.C Unit/ Komputer PC	1	2018	BAIK
223	Lap Top	1	2018	BAIK
224	Printer	1	2018	BAIK
225	Papan Nama Instansi	1	2018	BAIK
226	Papan Pengumuman	1	2018	BAIK
227	Mesin Tenun Reeling	1	2018	BAIK
228	Mesin Printing	1	2018	BAIK
229	Peralatan Re-Reeling	1	2018	BAIK
230	Pressure Steam	1	2018	BAIK
231	Alat Uji Tarik Benang	1	2018	BAIK
232	Twist Tester	1	2018	BAIK
233	Mini Bus	1	2006	BAIK
234	Kendaraan Dinas Roda 4	1	2003	BAIK
235	Roda Empat	1	2007	BAIK
236	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
237	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
238	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
239	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
240	Sepeda Motor	1	2007	BAIK

241	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
242	Sepeda Motor	1	2007	BAIK
243	Kursi Tamu	1	2005	BAIK
244	Meja 1/2 Biro	1	2006	BAIK
245	Mesin Ketik Manual	1	2007	BAIK
246	Lemari Besi/Metal	1	2007	BAIK
247	Kursi Rapat	20	2007	BAIK
248	Mesin Potong Rumput	1	2007	BAIK
249	AC Unit	1	2007	BAIK
250	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2007	BAIK
251	Bufet	1	2008	BAIK
252	Meja Rapat Dan Kursi	1	2008	BAIK
253	Sofa	1	2008	BAIK
254	Perabot Dapur	1	2008	BAIK
255	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	2008	BAIK
256	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	2008	BAIK
257	Lemari Arsip	1	2008	BAIK
258	Faximile	1	2012	BAIK
259	PC Unit / Komputer PC	2	2014	BAIK
260	AC	2	2014	BAIK
261	Peralatan dan Mesin - P.C Unit/ Komputer PC	1	2015	BAIK
262	Peralatan dan Mesin - Lap Top	1	2015	BAIK
263	Peralatan dan Mesin - Proyektor + Attachment	1	2015	BAIK
264	Peralatan dan Mesin - Printer	1	2015	BAIK
265	Peralatan dan Mesin - Lemari Besi	1	2015	BAIK
266	Peralatan dan Mesin - Lemari Es	1	2015	BAIK
267	Peralatan dan Mesin - Sound System	1	2015	BAIK
268	Peralatan dan Mesin - Lap Top	1	2015	BAIK
269	Peralatan dan Mesin - Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	2015	BAIK
270	Peralatan dan Mesin - AC Unit	2	2016	BAIK
271	Peralatan dan Mesin - Printer	1	2016	BAIK
272	Peralatan dan Mesin - P.C Unit/ Komputer PC	1	2016	BAIK
273	Peralatan dan Mesin - Gordyn	1	2016	BAIK
274	Peralatan dan Mesin - Lemari Besi	2	2016	BAIK
275	Peralatan dan Mesin - Meja Kerja	3	2016	BAIK
276	AC Unit	2	2017	BAIK
277	P.C Unit/ Komputer PC	2	2017	BAIK
278	Lap Top	3	2017	BAIK
279	Printer	4	2017	BAIK
280	Printer	2	2017	BAIK
281	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3	2017	BAIK
282	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	2017	BAIK
283	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	2017	BAIK
284	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	2017	BAIK
285	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	2017	BAIK
286	Televisi	1	2017	BAIK
287	Handphone	1	2018	BAIK
288	Lap Top	2	2018	BAIK
289	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2018	BAIK
290	Printer	4	2018	BAIK
291	P.C Unit/ Komputer PC	3	2018	BAIK
292	AC Unit	2	2018	BAIK
293	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	2018	BAIK
294	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	2018	BAIK
295	Sepeda Motor	1	2018	BAIK
296	Sepeda Motor	1	2018	BAIK
297	Sepeda Motor	1	2018	BAIK
298	Sepeda Motor	1	2018	BAIK
299	Televisi	2	2018	BAIK
300	Printer	1	2018	BAIK

301	Kursi Tamu	1	2019	BAIK
302	Printer	2	2020	BAIK
303	Lap Top	2	2021	BAIK
304	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	2021	BAIK
305	Lap Top	2	2021	BAIK
306	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2021	BAIK
307	P.C Unit	1	2021	BAIK
308	Alat Tenun Reeling	1	2021	BAIK
309	Alat Tenun Reeling	1	2021	BAIK
310	Alat Tenun Reeling	1	2021	BAIK
311	Alat Kantor Lainnya	1	2021	BAIK
312	Alat Tenun Reeling	1	2021	BAIK
313	Alat Kantor Lainnya	1	2021	BAIK
314	Alat Kantor Lainnya	5	2021	BAIK
315	Alat Kantor Lainnya	1	2021	BAIK
316	Alat Kantor Lainnya	5	2021	BAIK
317	Alat Tenun Reeling	1	2021	BAIK
318	Papan Visual/Papan Nama	1	2021	BAIK
319	Lemari kayu	14	2020	BAIK
320	Sofa	1	2020	BAIK
321	Kursi Rapat	50	2020	BAIK
322	Karpet	2	2020	BAIK
323	Papan Visual	1	2020	BAIK
324	AC Unit	3	2020	BAIK
325	Televisi	1	2020	BAIK
326	Wireless	1	2020	BAIK
327	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	2020	BAIK
328	Televisi	1	2022	BAIK
329	Alat Tenun Reeling	1	2022	BAIK
330	Mesin Selection Sutera	1	2022	BAIK
331	Mesin Selection Sutera	1	2022	BAIK
332	Mini Bus (14 Orang Penumpang)	1	2007	BAIK
333	P.C Unit	1	2023	BAIK
334	Lap Top	2	2023	BAIK
335	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2023	BAIK
336	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2023	BAIK
337	Pompa Air	1	2023	BAIK
338	Treng Air/Tandon Air	1	2023	BAIK
339	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2024	BAIK
340	Lap Top	5	2024	BAIK
341	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2024	BAIK
342	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	2024	BAIK
343	P.C Unit	7	2024	BAIK
344	Lap Top	1	2024	BAIK
345	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2024	BAIK
346	Lemari Kayu	1	2024	BAIK
347	Papan Tulis	2	2024	BAIK
348	Kursi Besi/Metal	20	2024	BAIK
349	Meja Rapat	1	2024	BAIK
350	Mesin Pemotong Rumput	1	2024	BAIK
351	Kursi Biasa	2	2024	BAIK
352	Meja Kerja Kayu	2	2024	BAIK
353	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2	2024	BAIK
354	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	2024	BAIK
355	A.C. Split	1	2024	BAIK

**Sumber data:** Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo 2025

Kondisi tersebut masih belum ideal mengingat Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo

adalah penggabungan dari 3 OPD menjadi 1 . pada Tahun 2025 kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana meningkat disebabkan beberapa faktor antara lain jumlah pegawai dan aktivitas operasional meningkat. Hal ini membutuhkan lebih banyak ruang kerja, peralatan kantor, dan fasilitas lainnya untuk mendukung kelancaran aktivitas. Dan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, perlu menyediakan peralatan dan teknologi yang lebih canggih, seperti komputer, perangkat lunak, atau sistem manajemen yang lebih baik.

## **BESARAN BELANJA ORGANISASI**

Pada setiap awal tahun anggaran setelah anggaran ditetapkan kemudian dibuat Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara Kepala Daerah (Bupati) selaku pemberi amanah dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM selaku penerima amanah . **B e s a r a n b e l a n j a o r g a n i s a s i** pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

### **Sumber Daya Keuangan Tahun 2025**

#### **Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab.Wajo**

<b>Uraian</b>	<b>Pagu Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Rasio</b>
<b>Belanja</b>	<b>10.088.316.164,00</b>	<b>9.127.052.470,00</b>	<b>90,47%</b>
Belanja Operasi	9.183.675.164,00	8.325.495.470,00	90,66%
Belanja Modal	904.641.000,00	801.557.000,00	88,60%

**Sumber data:** Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa besaran Anggaran yang dikelola oleh Dinas Perindagkop dan UKM Tahun 2025 sebesar **Rp. 10.088.316.164,-** dengan Realisasi sebesar **Rp. 9.127.052.470,-** atau **90,47 %** yang terdiri dari :

- Belanja Operasi dengan anggaran sebesar **Rp. 9.183.675.164,-** dengan realisasi Anggaran sebesar **Rp 8.325.495.470,-** atau **90,66 %** yang terdiri dari : Belanja Pegawai dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.6.334.120.414,- dengan realisasi Rp. 5.711.005.592,- atau 90,16% . Belanja Barang dan Jasa dengan Pagu sebesar Rp.2.849.554.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.614.489.878,- atau 91,75%.
- Belanja Modal dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 904.641.000,-** Realisasi sebesar **Rp. 801.557.000,-** atau **88,60%**. Yang terdiri dari : Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan anggaran Rp. 11.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.545.000,- atau 91,70% dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan anggaran sebesar Rp. 893.141.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 791.012.000,- atau 88,57%.

## **C. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama**

Permasalahan utama dalam rangka pelaksanaan pelayanan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo, meliputi:

1. Rendahnya Daya Saing dan Kualitas Industri Lokal
2. Meningkatnya produk impor yang murah yang menjadi persaingan dengan produk lokal
3. Masih rendahnya pemakaian produk dalam negeri
4. Belum adanya Kawasan sentra industri
5. Terbatasnya SDM/kemampuan pelaku IKM terkait inovasi dan update teknologi industri
6. Belum adanya ikon produk industri yang identik di masing-masing Kecamatan
7. Lemahnya fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha
8. Kurangnya optimalnya pemasaran perdagangan dalam daerah
9. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pasar
10. Rendahnya pengetahuan SDM Koperasi dan pelaku UKM
11. Belum optimalnya pengelolaan Koperasi dan UKM
12. Masih banyaknya Koperasi yang belum melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
13. Rendahnya kapabilitas Koperasi dalam mendapatkan akses pembiayaan permodalan
14. Rendahnya kapabilitas UKM dalam mendapatkan akses pembiayaan permodalan.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

*Pada bab kedua ini diuraikan tentang perencanaan strategis dan rangkaian/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo.*

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai dalam lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Wajo, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tiap tahun.

##### 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Dalam penetapan tujuan dan sasaran pada umumnya didasarkan pada faktor- faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap kegiatan dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Wajo.

Adapun **TUJUAN** yang ingin dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo dalam mendukung visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraab Urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
2. Meningkatkan Nilai Tambah Kegiatan Ekonomi Perindustrian dan Perdagangan.
3. Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Berusaha Bidang Koperasi dan UKM.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran dan program pemerintah Kabupaten yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Wajo 2025-2026 yang dipakai untuk pedoman penyusunan Renstra Dinas ditetapkan sasaran strategis.

**SASARAN** adalah penjabaran dari tujuan yaitu kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam melaksanakan kegiatan.

Adapun **sasaran** Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo tahun 2025-2026 antara lain:

1. Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
2. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan.
3. Terkendalinya Harga Bahan Pokok.
4. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Berdaya Saing.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo mempunyai tujuan dan Sasaran dalam mendukung Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (IKU RPD) Tahun 2025-2026 Adapun Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

**TABEL 2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KAB.WAJO TAHUN 2025**

IKU RPJMD	Target RPJMD Tahun 2025	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025
1	2	3	4	
Nilai / Predikat SAKIP kabupaten	64.3/ B	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Nilai Sakip PD	BB/70-89
		Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Meningkatnya Nilai SAKIP Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	BB/70-89
			Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%
Laju Pertumbuhan ekonomi	6,40	Meningkatkan Nilai tambah kegiatan Ekonomi Perindustrian dan Perdagangan	Kontribusi Sektor perindustrian, Perdagangan terhadap perokonomian Daerah	9,5%
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	4,80%
			Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	4,70%
Pengeluaran Perkapita	12.85	Terkendalnya Harga Bahan Pokok	Persentase Bahan Pokok yang terkendalikan harganya	100%
Tingkat pengangguran terbuka	2,44	Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bidang Koperasi dan UKM	Persentase Pertumbuhan UMKM Wirausaha Baru	4%
		Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing	Persentase Koperasi Sehat	2,08%
Tingkat Kemiskinan	5,71			Persentase Pertumbuhan UMKM

## 2. Publikasi

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kerja, terwujudnya komitmen penerimaan pemberi amanah dan kesepakatan antara penerinema dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang di hasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja ( outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan Sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dalam rencana kinerja Tahun 2025 Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo telah membuat penetapan kinerja tahun 2025 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2025.

Tujuan disusunnya perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara atasan dan bawahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menetapkan Indikator Kinerja yang jelas dan terukur untuk menilai sejauh mana perangkat daerah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Menjamin Pencapaian Tujuan Organisasi memastikan bahwa setiap perangkat daerah berkomitmen untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.
4. Mendorong Peningkatan Kualitas Layanan Publik sehingga perangkat daerah diharapkan dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
5. Memotivasi Kinerja Pegawai dan memberikan arahan yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab, yang dapat meningkatkan motivasi pegawai dalam menjalankan tugasnya.
6. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi Dengan adanya dokumen yang mengikat, perjanjian kinerja membantu memastikan bahwa perangkat daerah mematuhi peraturan yang berlaku.
7. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
8. Sebagai dasar penilaian keberhasilan /kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
9. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, pada Tahun 2025 Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo memiliki **13 Program, 21 Kegiatan dan 48 Sub.Kegiatan** dengan total Pagu Anggaran sebesar **Rp. 10.088.316.164,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 9.127.052.470,-** atau **90,47%**. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**TABEL 2.2 REKAPITULASI PERJANJIAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KAB.WAJO TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025		Jumlah Pagu Tahun 2025		Penanggung Jawab	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Nama	Jabatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Meningkatnya Nilai SAKIP Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	BB/70-89	BB/70-89	6.556.522.539	6.362.462.414	ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si	Kepala Dinas Perindagkop dan UKM
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	7.739.972.539	7.289.794.914	ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si	Kepala Dinas Perindagkop dan UKM
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi Kinerja Peragkat Daerah tepat waktu	100 %	100 %	39.500.000	22.883.000	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	17.000.000,00	6.780.000,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Terlaksananya Koordinasi dan Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	3.324.000,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Terlaksananya Koordinasi dan Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	3.324.000,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Terlaksananya Koordinasi dan Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	2.200.000,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	5.500.000,00	4.050.000,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Laporan data statistik sektoral daerah	33 Data	75 Data	2.000.000,00	955.000,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Berita Acara	2 Berita Acara	4.000.000,00	2.250.000,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	100%	6.517.022.539	6.339.579.414	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/b ulan	57 Orang/b ulan	6.507.022.539,00	6.334.120.414,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	4.929.000,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	530.000,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris

		Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	1.183.450.000	927.332.500	ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si	Kepala Dinas Perindagkop dan UKM
	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	100%	100%	30.000.000	16.489.800	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	16.489.800,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100%	100%	20.000.000	8.500.000	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	8.500.000,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	100%	426.600.000	217.872.900	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	5.000.000,00	2.998.000,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	5.000.000,00	2.497.700,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	30.000.000,00	15.022.000,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	0,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	368.600.000,00	197.355.200,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah Penunjang yang terpenuhi	100%	0%	-	-	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	574.850.000	563.619.800	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	32.509.800,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	134.000.000,00	72.000.000,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	395.850.000,00	459.110.000,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	100%	132.000.000	120.850.000	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	92.000.000,00	89.900.000,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	20.000.000,00	12.000.000,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	18.950.000,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris

2	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan</b>	<b>Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB</b>	4,70%	4,70%	<b>581.160.000</b>	<b>1.504.226.500</b>	<b>ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si</b>	<b>Kepala Dinas Perindagkop dan UKM</b>
	Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan	<b>Persentase Ketersediaan sarana distribusi perdagangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>249.000.000</b>	<b>1.123.337.000</b>	ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si	Kepala Dinas Perindagkop dan UKM
	Meningkatnya pengelolaan sarana Distribusi perdagangan	<b>Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun/dikelola</b>	<b>4 Unit</b>	<b>4 Unit</b>	<b>154.000.000</b>	<b>941.604.000</b>		
	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	<i>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan</i>	3 Unit	5 Unit	131.000.000,00	928.971.000,00	H.MUH.YUNUS, S.Sos	Kabid Pengelolaan Pasar
	Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	<i>Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	50 Unit	50 Unit	13.000.000,00	7.096.000,00	ANDI SUSIANA, S.Sos	Kabid Perdagangan
	terselenggaranya Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	<i>Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang</i>	1 laporan	1 laporan	10.000.000,00	5.537.000,00	ANDI SUSIANA, S.Sos	Kabid Perdagangan
	Meningkatnya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	<b>Jumlah Pembinaan dan pemantauan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan</b>	<b>12 kali</b>	<b>12 kali</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>181.733.000,00</b>		
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00	181.733.000,00	H.MUH.YUNUS, S.Sos	Kabid Pengelolaan Pasar
	<b>Meningkatkan Pengembangan Ekspor</b>	<b>Persentase Promosi dagang yang diselenggarakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>282.160.000</b>	<b>341.826.700</b>	<b>ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si</b>	<b>Kepala Dinas Perindagkop dan UKM</b>
	Terselenggaranya Promosi dan Misi Dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah kabupaten/kota	<b>Jumlah Promosi Dagang dan Misi Dagang yang diselenggarakan</b>	<b>4 kali</b>	<b>4 kali</b>	<b>282.160.000,00</b>	<b>341.826.700,00</b>		
	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</i>	15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	282.160.000,00	341.826.700,00	ANDI SUSIANA, S.Sos	Kabid Perdagangan
	<b>Meningkatkan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>Persentase Alat UTTP yang berstandarisasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>31.386.000</b>	<b>ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si</b>	<b>Kepala Dinas Perindagkop dan UKM</b>
	Terlaksananya kegiatan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	<b>Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan barang dan tertib niaga yang dilaksanakan</b>	<b>12 kali</b>	<b>12 kali</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>31.386.000,00</b>		
	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	<i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</i>	350 Unit	750 Unit	30.000.000,00	25.899.000,00	Hj.SUGISWATI,ST.,M.Si	Kepala UPT Metrologi
	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	<i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</i>	150 Orang	150 Orang	10.000.000,00	5.487.000,00	ANDI SUSIANA, S.Sos	Kabid Perdagangan
	<b>Meningkatkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>	<b>Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>7.676.800,00</b>	<b>ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si</b>	<b>Kepala Dinas Perindagkop dan UKM</b>
	Terselenggaranya Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<b>Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam promosi produk dalam negeri</b>	<b>20 UMKM</b>	<b>20 UMKM</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>7.676.800,00</b>		
	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</i>	20 UMKM	20 UMKM	10.000.000,00	7.676.800,00	Hj.SUGISWATI,ST.,M.Si	Kepala UPT Metrologi

		<b>Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB</b>	<b>4,80%</b>	<b>4,80%</b>	<b>216.857.000</b>	<b>114.371.100</b>	<b>ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si</b>	<b>Kepala Dinas Perindagkop dan UKM</b>
	Meningkatnya Perencanaan dan Pembangunan Industri	<b>Persentase Pertambahan Jumlah Industri</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>196.857.000</b>	<b>103.666.100</b>	ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si	
	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya data, informasi dan hasil dari pelaksanaan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota</i>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>196.857.000,00</b>	<b>103.666.100,00</b>		
	Terseleenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	41.971.600,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Plt.Bidang Perindustrian
	Terseleenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	17.938.500,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Plt.Bidang Perindustrian
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	101.857.000,00	43.756.000,00	MUHAMMAD ANAS,SE,M.A.P	Kepala UPT Persuteaan Alam
	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri	<b>Persentase data industri kecil, menengah di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>10.705.000</b>	ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si	
	Tersedianya Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah data yang masuk di sistem informasi industri berbasis SIINas</i>	<b>75 Data</b>	<b>75 Data</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10.705.000,00</b>		
	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	8.110.000,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Plt.Bidang Perindustrian
	Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	<i>Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.595.000,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Plt.Bidang Perindustrian
<b>3</b>	<b>Terkendalnya Harga Bahan Pokok</b>	<b>Persentase Bahan Pokok yang terkendalikan harganya</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>16.617.000</b>	<b>ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si</b>	<b>Kepala Dinas Perindagkop dan UKM</b>
	Meningkatkan Stabilisasi Harga barang kebutuhan Pokok dan barang penting	<b>Persentase ketersediaan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>16.617.000</b>	ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si	
	Meningkatnya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	<i>Jumlah Bahan pokok dengan harga yang terkendali</i>	<b>10 Bahan Pokok</b>	<b>10 Bahan Pokok</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>16.617.000,00</b>		
	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	5.487.000,00	ANDI SUSIANA, S.Sos	Kabid Perdagangan
	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	11.130.000,00	ANDI SUSIANA, S.Sos	Kabid Perdagangan

4	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing	Persentase Koperasi sehat	2,08%%	2,08%%	50.000.000	553.169.400	ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si	Kepala Dinas Perindagkop dan UKM
	Meningkatkan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi	100%	100%	5.000.000	486.495.000	ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si	
	Tersedianya rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi penerbitan izin usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	5.000.000,00	486.495.000,00		
	Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Unit Usaha	190 Unit Usaha	5.000.000,00	486.495.000,00	ANDI ABDUL WARIS	Kabid Pemberdayaan Koperasi
	Meningkatkan Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	100 %	100 %	27.000.000,00	54.211.000,00	ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si	
	Terlaksananya Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa	35 Koperasi	35 Koperasi	27.000.000,00	54.211.000,00		
	Terlaksananya Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	35 Unit Usaha	200 Unit Usaha	27.000.000,00	54.211.000,00	ANDI ABDUL WARIS	Kabid Pemberdayaan Koperasi
	Meningkatkan Penilaian Kesehatan KSP/USP/Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	100%	100%	18.000.000	12.463.400	ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si	
	Terselenggaranya Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam/Unit simpan pinjam koperasi	Jumlah koperasi KSP/USP yang dinilai tingkat kesehatannya	30 Koperasi	30 Koperasi	18.000.000,00	12.463.400,00		
	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	35 Unit Usaha	40 Unit Usaha	18.000.000,00	12.463.400,00	ANDI ABDUL WARIS	Kabid Pemberdayaan Koperasi
		Persentase Pertumbuhan UMKM	5,2%	5,2%	280.000.000	610.137.250	ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si	Kepala Dinas Perindagkop dan UKM
	Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan UMKM Wirausaha Baru	100%	100%	176.250.000	460.299.250	ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si	
	Terlaksananya Pemberdayaan UMKM melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah UMKM yang dibina melalui pendataan, kemitraan, perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan	178 UMKM	178 UMKM	176.250.000,00	460.299.250,00		
	Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	10.000.000,00	333.460.000,00	ANDI RAHMAYANTI, SE,M.Si	Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM
	Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	18 Unit Usaha	50 Unit Usaha	16.000.000,00	18.100.000,00	ANDI RAHMAYANTI, SE,M.Si	
	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	130 Unit Usaha	520 Unit Usaha	55.250.000,00	8.739.250,00	ANDI RAHMAYANTI, SE,M.Si	
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	25 Orang	70 Orang	95.000.000,00	100.000.000,00	ANDI RAHMAYANTI, SE,M.Si	
	Berkembangnya UMKM	Cakupan Promosi Produk UKM	100%	100%	103.750.000	149.838.000	ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si	
	Terselenggaranya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan dengan Orientasi skala usaha menjadi skala kecil	30 UMKM	30 UMKM	103.750.000,00	149.838.000,00		
	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	20 Unit Usaha	4 Unit Usaha	22.750.000,00	18.473.000,00	ANDI RAHMAYANTI, SE,M.Si	Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM
	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	6 Unit Usaha	5 Unit Usaha	81.000.000,00	131.365.000,00	ANDI RAHMAYANTI, SE,M.Si	Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM
	<b>JUMLAH</b>				<b>8.897.989.539</b>	<b>10.088.316.164</b>		

## 2. Publikasi

The screenshot shows the 'Perjanjian Kinerja' (Performance Agreement) page in the e-SAKIP REVUI system. The page features a table with the following data:

No	Username	Unit Kerja	Tgl Upload	Dokumen	Keterangan	Aksi	Tanggapan
1	disperindagkop.kab.wajo	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	22 Jan 2025 20:40	Lihat	Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan 2024	Hapus	
2	disperindagkop.kab.wajo	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	22 Jan 2025 16:27	Lihat	Perjanjian Kinerja 2025	Hapus	
3	disperindagkop.kab.wajo	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	23 Feb 2024 15:30	Lihat	Dokumen PK Pokok 2024	Hapus	
4	disperindagkop.kab.wajo	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	12 Feb 2024 21:27	Lihat	Dokumen PK Perubahan 2023	Hapus	
5	disperindagkop.kab.wajo	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	19 Feb 2023 12:26	Lihat	DOKUMEN PK POKOK 2023	Hapus	

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

*Pada bab ketiga ini disajikan tentang akuntabilitas kinerja yang meliputi capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran dilakukan analisa secara komprehensif.*

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Capaian indikator kinerja yang dilaksanakan pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo merupakan ukuran atas hasil (kinerja) organisasi dari target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam periode tahun anggaran berjalan sebagai dasar pengukuran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo disusun berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999, keputusan kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2025-2026 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (input), keluaran (output), hasil, manfaat dan dampak (outcome). Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan pengolahan masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk

memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut .

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi} \times 100}{\text{Target}}$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi} \times 100}{\text{Target}}$$

Berdasarkan pengukuran tersebut diperoleh sasaran tingkat capaian dikelompokkan dalam 6 kategori yaitu:

- \* Memuaskan >85-100 %
- \* Sangat baik >75-85 %
- \* Baik >65-75 %
- \* Cukup >50-65 %
- \* Kurang >30-50 % dan
- \* Sangat kurang -30 %

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada melebihi target. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 100% termasuk pada tidak tercapainya target. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahapan ini evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Melihat pada skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Tabel VII.C Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka secara umum Pemerintah Kabupaten Wajo melalui Dinas Perindagkop dan UKM untuk tahun 2025 telah melaksanakan tugas dalam pencapaian kinerja sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo Tahun 2025.

### 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Hasil pengukuran PK Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Wajo sebagai berikut:

**TABEL 3.1 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi	Capain (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Meningkatnya Nilai SAKIP Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	BB/70-89			Belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat Daerah
		Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	4,80%			Realisasi 2025 *Buku Wajo Dalam Angka blm di Rilis di Tahun 2026*
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	4,70%			Realisasi 2025 *Buku Wajo Dalam Angka blm di Rilis di Tahun 2026*
3	Terkendalinya Harga Bahan Pokok	Persentase Bahan Pokok yang terkendalikan harganya	100%	100%	100%	
4	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing	Persentase Koperasi sehat	2,08%	2,34%	112,50%	
		Persentase Pertumbuhan UMKM	5,2%	2,78%	53,46%	

Dari tabel di atas, terdapat 4 (Empat) sasaran yang terbagi dalam 7 indikator :

1. Pada Pada Tahun 2024 target Nilai SAKIP BB/70-79 dengan Predikat 80,70 dengan kategori yaitu **A** dengan Meningkatnya Nilai SAKIP Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM ini mencerminkan mulai terwujudnya efisiensi dalam mewujudkan kinerja dan system manajemen kinerja yang andal. Pada Tahun 2025 target Nilai SAKIP BB/70-89 dengan Predikat ..... dengan kategori yaitu ..... ( Menunggu hasil evaluasi dari inspektorat ).
2. Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah dari target sebesar 100 % Realisasi 100 % dengan Capaian 100% ,

3. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB target 2024 sebesar 4,6% realisasi 4,26% dengan capaian 92,52% %, Target tahun 2025 sebesar 4,80% dengan Realisasi.....(Buku Wajo dalam angka belum rilis )
4. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dengan Target 2024 sebesar 4,5 % dengan Realisasi 17,59% dengan Capaian 3,91%, Target tahun 2025 sebesar 4,70% dengan Realisasi..... (Buku Wajo dalam angka belum rilis )
5. Persentase Bahan Pokok yang terkendalikan harganya dengan Target 100% dengan Realisasi 100 % capaian 100%.
6. Persentase Koperasi sehat dengan Target 2.08 % dengan Realisasi 2,34 % capaian 112,50 % .
7. Persentase Pertumbuhan UMKM dengan Target 5,2 % dengan Realisasi 2,78 % capaian 53,46 %.

Pencapaian Indikator tersebut tidak lepas dari kerjasama yang erat di Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo.

**TABEL 3.1.1 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM TAHUN 2025**

**Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM**

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan Perangkat Daerah		Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian (%)	Penanggung Jawab		Keterangan
							Nama	Jabatan	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM		Meningkatnya Nilai SAKIP Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	BB/70-89			ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si	Kepala Dinas Perindagkop dan UKM	
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si	Kepala Dinas Perindagkop dan UKM	
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi Kinerja Peragkat Daerah tepat waktu	100 %	100 %	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
		Terlaksananya Koordinasi dan Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
		Terlaksananya Koordinasi dan Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
		Terlaksananya Koordinasi dan Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan data statistik sektoral daerah	75 Data	75 Data	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	100%	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/b ulan	57 Orang/b ulan	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	

		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si</b>	<b>Kepala Dinas Perindagkop dan UKM</b>	
	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<b>Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD</b>	100%	100%	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>Persentase Pegawai PD yang dilayani</b>	100%	100%	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	0 Orang	0 Orang	0,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	15 Paket	15 Paket	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	20 Paket	20 Paket	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	20 Paket	20 Paket	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	12 Laporan	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Persentase BMD Perangkat Daerah Penunjang yang terpenuhi</b>	0%	0%		MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si</b>	<b>Sekretaris</b>	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si</b>	<b>Sekretaris</b>	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Sekretaris	

**TABEL 3.1.2 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM TAHUN 2025**

**Sasaran Strategis 2 :Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan**

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian (%)	Penanggung Jawab		Keterangan
						Nama	Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan</b>	<b>Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB</b>	4,70%			ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si	<b>Kepala Dinas Perindagkop dan UKM</b>	
	Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan	<b>Persentase Ketersediaan sarana distribusi perdagangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%	ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si	Kepala Dinas Perindagkop dan UKM	
	Meningkatnya pengelolaan sarana Distribusi perdagangan	<b>Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun/dikelola</b>	<b>4 Unit</b>	<b>4 Unit</b>	100%			
	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	<i>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan</i>	5 Unit	5 Unit	100%	H.MUH.YUNUS, S.Sos	Kabid Pengelolaan Pasar	
	Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	<i>Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	50 Unit	50 Unit	100%	ANDI SUSIANA, S.Sos	Kabid Perdagangan	
	terselenggaranya Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	<i>Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang</i>	1 laporan	1 laporan	100%	ANDI SUSIANA, S.Sos	Kabid Perdagangan	
	Meningkatnya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	<b>Jumlah Pembinaan dan pemantauan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan</b>	<b>12 kali</b>	<b>12 kali</b>	100%			
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	H.MUH.YUNUS, S.Sos	Kabid Pengelolaan Pasar	
	<b>Meningkatkan Pengembangan Ekspor</b>	<b>Persentase Promosi dagang yang diselenggarakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si	<b>Kepala Dinas Perindagkop dan UKM</b>	
	Terselenggaranya Promosi dan Misi Dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah kabupaten/kota	<b>Jumlah Promosi Dagang dan Misi Dagang yang diselenggarakan</b>	<b>4 kali</b>	<b>4 kali</b>	100%			
	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</i>	15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	100%	ANDI SUSIANA, S.Sos	Kabid Perdagangan	
	<b>Meningkatkan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>Persentase Alat UTTP yang berstandarisasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si	<b>Kepala Dinas Perindagkop dan UKM</b>	
	Terlaksananya kegiatan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	<b>Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan barang dan tertib niaga yang dilaksanakan</b>	<b>12 kali</b>	<b>12 kali</b>	100%			
	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	<i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</i>	750 Unit	750 Unit	100%	ANDI SUSIANA, S.Sos	Kabid Perdagangan	
	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	<i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</i>	150 Orang	150 Orang	100%			

	Meningkatkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam penggunaan dan pemasaran produk dalam Negeri	100 %	100%	100%	ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si	Kepala Dinas Perindagkop dan UKM	
	Terselenggaranya Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam promosi produk dalam negeri	20 UMKM	20 UMKM	100%			
	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20 UMKM	20 UMKM	100%			
		Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	4,80%		ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si	Kepala Dinas Perindagkop dan UKM	Kepala Dinas Perindagkop dan UKM	
	Meningkatnya Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan Jumlah Industri	85%	85%	100%			
	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersedianya data, informasi dan hasil dari pelaksanaan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	100%			
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Plt.Bidang Perindustrian	
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Plt.Bidang Perindustrian	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	MUHAMMAD ANAS	Kepala UPT Persuteaan Alam	
	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri	Persentase data industri kecil, menengah di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas	100%	100%	100%			
	Tersedianya Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data yang masuk di sistem informasi industri berbasis SIINas	75 Data	75 Data	100%			
	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Plt.Bidang Perindustrian	
	Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	MUH.TAHIR TAJANG, SP.,M.Si	Plt.Bidang Perindustrian	

**TABEL 3.1.3 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM TAHUN 2025**

**Sasaran Strategis 3 :Terkendalnya Harga Bahan Pokok**

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian (%)	Penanggung Jawab		Keterangan
						Nama	Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	<b>Terkendalnya Harga Bahan Pokok</b>	<b>Persentase Bahan Pokok yang terkendalikan harganya</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si</b>	<b>Kepala Dinas Perindagkop dan UKM</b>	
	Meningkatkan Stabilisasi Harga barang kebutuhan Pokok dan barang penting	<b>Persentase ketersediaan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>	100%	100%	100%	ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si	Kabid Perdagangan	
	Meningkatnya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	<b>Jumlah Bahan pokok dengan harga yang terkendali</b>	<b>10 Bahan Pokok</b>	<b>10 Bahan Pokok</b>	100%	ANDI SUSIANA, S.Sos	Kabid Perdagangan	
	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	12 Laporan	12 Laporan	100%	ANDI SUSIANA, S.Sos	Kabid Perdagangan	
	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	1 Laporan	100%	ANDI SUSIANA, S.Sos	Kabid Perdagangan	

**TABEL 3.1.4 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM TAHUN 2025**

**Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing**

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian (%)	Penanggung Jawab		Keterangan
						Nama	Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	<b>Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing</b>	<b>Persentase Koperasi sehat</b>	<b>2,08%%</b>			<b>ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si</b>	<b>Kepala Dinas Perindagkop dan UKM</b>	
	Meningkatkan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	<b>Persentase Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%	ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si		
	Tersedianya rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah rekomendasi penerbitan izin usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan</i>	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	100%			
	Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	190 Unit Usaha	190 Unit Usaha	100%	ANDI ABDUL WARIS,S.Sos,M.Si	Kabid Pemberdayaan Koperasi	
	Meningkatkan Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	<b>Persentase Koperasi Aktif</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	100%	ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si		
	Terlaksananya Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa</i>	35 Koperasi	35 Koperasi	100%			
	Terlaksananya Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	100%	ANDI ABDUL WARIS,S.Sos,M.Si	Kabid Pemberdayaan Koperasi	
	Meningkatkan Penilaian Kesehatan KSP/USP/Koperasi	<b>Persentase Koperasi Sehat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si</b>		
	Terselenggaranya Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam/Unit simpan pinjam koperasi	<i>Jumlah koperasi KSP/USP yang dinilai tingkat kesehatannya</i>	30 Koperasi	30 Koperasi	100%			
	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha		ANDI ABDUL WARIS,S.Sos,M.Si	Kabid Pemberdayaan Koperasi	

		<b>Persentase Pertumbuhan UMKM</b>	5,2%			<b>ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si</b>	<b>Kepala Dinas Perindagkop dan UKM</b>	
	Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	<b>Persentase Pertumbuhan UMKM Wirausaha Baru</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si</b>		
	Terlaksananya Pemberdayaan UMKM melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	<i>Jumlah UMKM yang dibina melalui pendataan, kemitraan, perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan</i>	178 UMKM	178 UMKM	100%			
	Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	100%	ANDI RAHMAYANTI, SE,M.Si	Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	
	Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	100%	ANDI RAHMAYANTI, SE,M.Si	Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	
	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	<i>Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata</i>	520 Unit Usaha	520 Unit Usaha	100%	ANDI RAHMAYANTI, SE,M.Si	Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>	70 Orang	70 Orang	100%	ANDI RAHMAYANTI, SE,M.Si	Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	
	<b>Berkembangnya UMKM</b>	<b>Cakupan Promosi Produk UKM</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>ANDI ASO ASHARI,ST,M.Si</b>		
	Terselenggaranya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	<i>Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan dengan orientasi skala usaha menjadi skala kecil</i>	30 UMKM	30 UMKM	100%			
	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>	4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	100%	ANDI RAHMAYANTI, SE,M.Si	Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	
	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i>	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	100%	ANDI RAHMAYANTI, SE,M.Si	Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	

## 2. Perbandingan Antara Realisasi Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023

### a. Capaian Realisasi Tahun 2023-2025

Perbandingan hasil indikator pada PK Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.2 PERDANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Keterangan
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	6	6	6	7
1	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Meningkatnya Nilai SAKIP Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	A/'80,61	A/'80,70		Belum dilakukan Penilaian oleh Inspektorat Daerah
		Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	4,15	4,26%		Realisasi 2025 *Buku Wajo Dalam Angka blm Rilis*
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	17,29	17,59%		Realisasi 2025 *Buku Wajo Dalam Angka blm Rilis*
3	Terkendalinya Harga Bahan Pokok	Persentase Bahan Pokok yang terkendalikan harganya	100%	100%	100%	
4	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing	Persentase Koperasi sehat	6,2%	5,76%	2,34%	
		Persentase Pertumbuhan UMKM	1,27%	0,066%	2,78%	

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. Meningkatnya Nilai SAKIP Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dari tahun 2023 sampai 2024 mengalami peningkatan dari Nilai 80,61 meningkat menjadi 80,70 dan tahun 2025 belum ada hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah.
- B. Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah dari tahun 2023 sampai dengan 2025 capaian realisasi 100%.
- C. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB tahun 2023 dengan target 4,5% dengan realisasi 4,15% dengan capaian 92,99% , target 2024 sebesar 4,6% realisasi 4,26% dengan capaian 92,52% %, Target tahun 2025 sebesar 4,80% dengan Realisasi.....(Buku Wajo dalam angka belum rilis )
- D. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB tahun 2023 dengan target 4,4% dengan realisasi 17,29 % dengan capaian 392,95%, Target 2024 sebesar 4,5 % dengan Realisasi 17,59% dengan Capaian 3,91%, Target tahun 2025 sebesar 4,70% dengan Realisasi..... (Buku Wajo dalam angka belum rilis )
- E. Persentase Bahan Pokok yang terkendalikan harganya, mulai pada tahun 2023 target 100% realisasi 100%. Dan target 2023 100% dengan realisasi 100%. Tahun 2024 dengan Target 100% dan realisasi 100%.
- F. Persentase Pertumbuhan UMKM pada tahun 2023 dengan target 4,5% dengan realisasi 1,27%. Tahun 2024 dengan Target 5% dengan Realisasi 0,066% dengan Capaian 0.013%, mengalami penurunan dari target yang sudah ditetapkan disebabkan beberapa faktor antara lain Keterbatasan Akses Pembiayaan Banyak UMKM yang kesulitan mendapatkan akses pembiayaan yang terjangkau, Kurangnya keterampilan atau pelatihan SDM yang memadai untuk pengelola atau pekerja UMKM dapat mempengaruhi efisiensi dan kualitas produk, yang berdampak pada penurunan daya saing, Fluktuasi ekonomi global dan domestik, seperti inflasi, perubahan harga bahan baku, atau kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, bisa menyebabkan ketidakstabilan yang mengganggu keberlanjutan UMKM . Dan target realisasi tidak sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan. Dan Tahun 2025 dengan target 5,2% realisasi 2,78% dengan capaian 53,46% mengalami kenaikan menunjukkan perkembangan UMKM yang semakin positif. Pertumbuhan tersebut didukung oleh meningkatnya jumlah UMKM aktif, penguatan akses pembiayaan, serta dorongan transformasi digital dan perluasan pasar. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian ini menandakan keberhasilan upaya pengembangan UMKM dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- G. Persentase Koperasi Sehat mulai pada Tahun 2023 dengan target 2,56% dengan realisasi 6,20% dengan capaian 242,19 % Ini mengalami peningkatan dari target yang ditentukan. Pada tahun 2024 dengan target 2,08% dengan Realisasi 5,76% dengan capaian 276% ini mengalami peningkatan dari target yang sudah ditentukan. Dan tahun 2025 dengan target 2,08% Realisasi 2,34% dengan capaian 112,5% mengalami penurunan dibanding tahun 2024 ini disebabkan karena masih banyak nya koperasi yang tidak melakukan Rapat Anggaran Tahunan.

### 3. Perbandingan Realisasi dan target Renstra Perangkat Daerah

**TABEL 3.3 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DENGAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja ke Tujuh indikator telah sesuai dengan capaian target pertahunnya. Sehingga besar kemungkinan target kinerja Renstra bisa dicapai.

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Target PK 2025	Target Renstra Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Meningkatnya Nilai SAKIP Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	BB/70-89	BB/70-89		Belum dilakukan Penilaian oleh Inspektorat Daerah
		Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	4,8%	4,8%		Realisasi 2025 *Buku Wajo Dalam Angka blm Rilis*
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	4,7%	4,7%		Realisasi 2025 *Buku Wajo Dalam Angka blm Rilis*
3	Terkendalinya Harga Bahan Pokok	Persentase Bahan Pokok yang terkendalikan harganya	100%	100%	100%	
4	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing	Persentase Koperasi sehat	2,08%	2,08%	2,34%	
		Persentase Pertumbuhan UMKM	5,2%	5,2%	2,78%	

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standard Nasional (Jika Ada)

TABEL 3.4 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Target PK 2025	Data Standar Nasional (Jika Ada)	Realisasi Tahun 2025	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Meningkatnya Nilai SAKIP Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	BB/70-89			Belum dilakukan Penilaian oleh Inspektorat Daerah
		Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%		100%	
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	4,8%			Realisasi 2025 *Buku Wajo Dalam Angka blm Rilis*
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	4,7%			Realisasi 2025 *Buku Wajo Dalam Angka blm Rilis*
3	Terkendalnya Harga Bahan Pokok	Persentase Bahan Pokok yang terkendalikan harganya	100%		100%	
4	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing	Persentase Koperasi sehat	2,08%		2,34%	
		Persentase Pertumbuhan UMKM	5,2%		2,78%	

## 5. Analisis Penyebab Peningkatan Penurunan Kinerja dan Solusi

**TABEL 3.5 ANALISIS PENYEBAB PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA DAN SOLUSI**

No	Indikator	Capaian (%)	Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja	Upayah yang Telah Dilakukan	Solusi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Nilai SAKIP Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM		Belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Penyelarasan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja</li> <li>- Penetapan indikator kinerja yang terukur dan relevan</li> <li>- Peningkatan kualitas pelaporan kinerja</li> <li>- Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala</li> <li>- Penguatan akuntabilitas dan tata kelola organisasi</li> <li>- Peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan SAKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelarasan perencanaan, anggaran, dan kinerja</li> <li>- Penetapan indikator kinerja yang jelas dan terukur</li> <li>- Peningkatan monitoring dan evaluasi secara berkala</li> <li>- Penguatan akuntabilitas dan pelaporan kinerja</li> <li>- Pemanfaatan data dan sistem informasi kinerja</li> <li>- Peningkatan kapasitas SDM aparatur Disperindagkop dan UKM</li> <li>- Fokus pada program yang berdampak langsung ke masyarakat</li> </ul>
2	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja perangkat daerah.	Melakukan Penilaian kinerja perangkat Daerah dan sumberdaya manusia aparatur melalui Perencanaan kinerja, Pelaporan Kinerja serta Evaluasi dan Capaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas SDM dan kapabilitas kelembagaan, koordinasi dan kompetensi sumber daya manusia
3	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB		Buku Wajo dalam angka belum dirilis	pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan dan sosialisasi, dengan tujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi pengusaha kerajinan dalam rangka meningkatkan usahanya , fasilitasi pemasaran produk kerajinan , dan memberikan fasilitasi akses permodalan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan Hilirisasi Industri dengan Mendorong pengolahan bahan baku lokal agar memiliki nilai tambah lebih tinggi dan Mengurangi ekspor bahan mentah dan meningkatkan produk setengah jadi maupun jadi</li> <li>- Pengembangan Infrastruktur Pendukung dengan Penyediaan kawasan industri terpadu</li> <li>- Peningkatan Kualitas SDM Industri</li> <li>- Penerapan Teknologi dan Inovasi</li> <li>- Penguatan UMKM Industri Pengolahan melalui Akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan sertifikasi produk</li> </ul>
4	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		Buku Wajo dalam angka belum dirilis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Infrastruktur Perdagangan</li> <li>- Pemberdayaan UMKM dan Pedagang</li> <li>- Digitalisasi Perdagangan melalui sistem pembayaran digital, dan pemasaran online bagi pelaku usaha.</li> <li>- Stabilisasi Harga melalui Operasi pasar, pengendalian inflasi daerah, penguatan cadangan dan distribusi barang kebutuhan pokok.</li> <li>- Promosi Dagang</li> <li>- Penataan Pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan UMKM dan Pedagang Lokal melalui Pelatihan manajemen usaha, pemasaran, dan Pendampingan legalitas usaha (NIB, izin edar, sertifikasi)</li> <li>- Digitalisasi sistem pembayaran (QRIS, non-tunai)</li> <li>- Perbaikan Infrastruktur Perdagangan</li> <li>- Peningkatan Daya Saing Produk</li> <li>- Perluasan Akses Pasar melalui Fasilitasi promosi dan pameran dagang serta Kerja sama perdagangan dengan daerah lain.</li> </ul>
5	Persentase Bahan Pokok yang terkendalikan harganya	100%	Harga bahan pokok bersifat fluktuatif, sehingga pemerintah terus berupaya untuk melakukan rehabilitasi harga agar kenaikan harga tidak melonjak, salah satunya ialah dengan melalui sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok (SP2KP).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pemantauan harga bahan pokok secara berkala.</li> <li>- Melakukan Pasar Murah.</li> </ul>	- Menambah pasokan komoditi pokok agar stabilitas harga bisa terjaga, dan kenaikan harga bisa diminimalisir agar stabilitas harga bisa terjaga.
6	Persentase Koperasi sehat	112,50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adanya pembinaan, Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi.</li> <li>- Adanya Kegiatan Pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi yang mampu memberikan kontrol lebih bagi anggota serta kepercayaan masyarakat umum.</li> <li>- Meningkatkan pengetahuan pengurus, pengawas, anggota, pengelola dan karyawan pada Kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian.</li> <li>-Meningkatkan pengelolaan administrasi Koperasi melalui Kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi.</li> <li>- Melakukan kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP/Koperasi.</li> <li>- Memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengurus Koperasi dan Anggotanya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan SDM pengurus dan pengelola koperasi dengan mengikutsertakan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian.</li> <li>-Melakukan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan koperasi secara terus menerus.</li> <li>-Mendorong koperasi untuk melaksanakan RAT tepat waktu.</li> <li>-Memberikan sertifikat hasil penilaian kesehatan kepada koperasi yang berpredikat sehat dan cukup sehat.</li> <li>-Memberikan piagam penghargaan kepada koperasi penyelenggara RAT</li> </ul>
7	Persentase Pertumbuhan UMKM	63,41%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyaknya bermunculan wirausaha baru</li> <li>- Adanya peran serta Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membangkitkan kembali UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan dukungan finansial dalam hal ini memberikan bantuan modal ke pelaku UMKM.</li> <li>- Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pemilik UMKM agar dapat mengelola bisnis mereka dengan lebih baik.</li> <li>- Memberikan perlindungan hukum bagi UMKM melalui undang-undang dan peraturan yang sesuai, agar UMKM dapat beroperasi dengan aman dan adil.</li> </ul>	Melakukan Pembinaan dan Pendampingan terhadap pelaku UMKM di Kab.Wajo

#### **a. Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja**

1. Ada Kerja sama antara pimpinan dan bawahan
2. Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja perangkat daerah
3. Adanya kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan dalam menciptakan iklim kerja dan meningkatnya daya beli masyarakat mendorong pertumbuhan industri. Semakin berkembang industri dengan menerapkan inovasi, kemudahan bahan baku, penggunaan mesin berteknologi, peningkatan produksi menjadi pilar utama dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
4. Harga bahan pokok bersifat fluktuatif, sehingga pemerintah terus berupaya untuk melakukan rehabilitasi harga agar kenaikan harga tidak melonjak, salah satunya ialah dengan melalui sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok (SP2KP).
5. Adanya pembinaan, Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi.
6. Banyaknya bermunculan wirausaha baru.
7. Adanya peran serta Pemerintah Pusat dan daerah untuk membangkitkan kembali UMKM.
8. Meningkatnya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas perindagkop dan UKM dari tahun ketahun

#### **b. Upaya yang telah dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM antara lain:**

1. Melakukan Penilaian kinerja perangkat Daerah dan sumberdaya manusia aparatur melalui Perencanaan kinerja, Pelaporan Kinerja serta Evaluasi dan Capaian Perangkat Daerah
2. Melakukan pemantauan harga bahan pokok secara berkala dan Melakukan Pasar Murah.
3. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi.
4. Melakukan kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP/Koperasi.
5. Memberikan dukungan finansial dalam hal ini memberikan bantuan modal ke pelaku UMKM.
6. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pemilik UMKM agar dapat mengelola bisnis mereka dengan lebih baik.
7. Memberikan perlindungan hukum bagi UMKM melalui undang-undang dan peraturan yang sesuai, agar UMKM dapat beroperasi dengan aman dan adil.

#### **c. Solusi untuk penyelesaian hambatan meningkatnya efektivitas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM antara lain:**

- Penyelarasan perencanaan, anggaran, dan kinerja
- Meningkatkan Kinerja Pegawai melalui Peningkatan Kompetensi Aparatur Melalui Bimbingan Teknis Sesuai Tupoksi
- Melakukan Pembinaan dan Pendampingan serta Peningkatan SDM terhadap pelaku IKM
- Melakukan pemantauan harga bahan pokok secara berkala dan Menambah pasokan komoditi pokok agar stabilitas harga bisa terjaga, dan kenaikan harga bisa diminimalisir agar stabilitas harga bisa terjaga
- Melakukan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan koperasi secara terus menerus.
- Mendorong koperasi untuk melaksanakan RAT tepat waktu.
- Melakukan Pembinaan dan Pendampingan terhadap pelaku UMKM di Kab.Wajo

6. Analisis atas efisiensi Penggunaan sumber daya

TABEL 3.6 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan Perangkat Daerah	Capaian (%)	Jumlah Anggaran			Analisis Efisiensi Sumber Daya	Keterangan
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6		
1	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	100%	7.289.794.914	6.633.055.326	90,99%	25 Oarng	
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdangan		1.618.597.600	1.436.850.174	88,77%	15 Orang	
3	Terkendalnya Harga Bahan Pokok	100%	16.617.000	16.575.858	99,75%	10 Orang	
4	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing	77,46%	1.163.306.650	1.040.571.112	89,45%	16 Orang	
<b>JUMLAH</b>			<b>10.088.316.164</b>	<b>9.127.052.470</b>	<b>90,47%</b>		

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab.Wajo terlibat semua sesuai dengan sasaran strategis.

**TABEL 3.6.1 ANALISIS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan Perangkat Daerah	Capaian (%)	Jumlah Anggaran			Analisis Efisiensi Sumber Daya	Keterangan
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6		
1	<b>Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM</b>		7.289.794.914	6.633.055.326	90,99%		
	<b>Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		7.289.794.914	6.633.055.326	90,99%		
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		22.883.000	21.932.449	95,85%		
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6.780.000,00	6.481.262	95,59%	3 Orang	
	Terlaksananya Koordinasi dan Tersedianya Dokumen RKA-SKPD		3.324.000,00	3.265.287	98,23%	3 Orang	
	Terlaksananya Koordinasi dan Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3.324.000,00	3.265.287	98,23%	3 Orang	
	Terlaksananya Koordinasi dan Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2.200.000,00	2.143.555	97,43%	3 Orang	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.050.000,00	3.653.710	90,22%	3 Orang	
	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		955.000,00	873.348	91,45%	3 Orang	
	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.250.000,00	2.250.000	100,00%	3 Orang	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.339.579.414	5.716.447.252	90,17%		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		6.334.120.414,00	5.711.005.592	90,16%	7 Orang	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4.929.000,00	4.911.660	99,65%	7 Orang	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		530.000,00	530.000	100,00%	3 Orang	

	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		16.489.800	16.437.103	99,68%		
	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		16.489.800,00	16.437.103,00	99,68%	4 Orang	
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		8.500.000	8.499.417	99,99%		
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		8.500.000,00	8.499.417	99,99%	8 Orang	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		<b>217.872.900</b>	215.379.769	98,86%		
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2.998.000,00	2.972.147	99,14%	8 Orang	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		2.497.700,00	2.384.613	95,47%	8 Orang	
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		15.022.000,00	14.460.303	96,26%	8 Orang	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		197.355.200,00	195.562.706	99,09%		
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<b>563.619.800</b>	534.467.109	94,83%		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		32.509.800,00	32.016.898	98,48%	8 Orang	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		72.000.000,00	67.540.211	93,81%	8 Orang	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		459.110.000,00	434.910.000	94,73%	8 Orang	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<b>120.850.000</b>	119.892.227	99,21%		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		89.900.000,00	89.136.227,00	99,15%	8 Orang	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12.000.000,00	11.967.500,00	99,73%	8 Orang	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		18.950.000,00	18.788.500,00	99,15%	8 Orang	

2	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan</b>		<b>1.618.597.600</b>	<b>1.436.850.174</b>	88,77%		
	<b>Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan</b>		<b>1.123.337.000</b>	<b>958.208.234</b>	85,30%		
	Meningkatnya pengelolaan sarana Distribusi perdagangan		<b>941.604.000</b>	839.103.434	89,11%		
	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan		928.971.000,00	826.481.136	88,97%	16 Orang	
	Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		7.096.000,00	7.085.614	99,85%	7 Orang	
	terselenggaranya Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota		5.537.000,00	5.536.684	99,99%	7 Orang	
	Meningkatnya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan		<b>181.733.000,00</b>	119.104.800	65,54%		
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		181.733.000,00	119.104.800	65,54%	16 Orang	
	<b>Meningkatkan Pengembangan Ekspor</b>		<b>341.826.700</b>	<b>332.415.520</b>	97,25%		
	Terselenggaranya Promosi dan Misi Dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah kabupaten/kota		<b>341.826.700,00</b>	332.415.520	97,25%		
	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional		341.826.700,00	332.415.520	97,25%	7 Orang	
	<b>Meningkatkan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>		<b>31.386.000</b>	<b>30.295.683</b>	96,53%		
	Terlaksananya kegiatan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan		<b>31.386.000,00</b>	30.295.683	96,53%		
	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku		25.899.000,00	24.813.219	95,81%	5 Orang	
	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		5.487.000,00	5.482.464	99,92%	7 Orang	
	<b>Meningkatkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>		<b>7.676.800,00</b>	<b>4.792.690,00</b>	62,43%		
	Terselenggaranya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		<b>7.676.800,00</b>	4.792.690	62,43%		
	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		7.676.800,00	4.792.690	62,43%	7 Orang	

	<b>Meningkatnya Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>		<b>103.666.100</b>	100.754.163	97,19%		
	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		<b>103.666.100,00</b>	100.754.163	97,19%		
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		41.971.600,00	41.197.543	98,16%	7 Orang	
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		17.938.500,00	16.105.500	89,78%	7 Orang	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		43.756.000,00	43.451.120	99,30%	7 Orang	
	<b>Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri</b>		<b>10.705.000</b>	<b>10.383.884</b>	97,00%		
	Tersedianya Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		<b>10.705.000,00</b>	<b>10.383.884,00</b>	97,00%		
	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		8.110.000,00	7.788.953,00	96,04%	7 Orang	
	Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS		2.595.000,00	2.594.931,00	100,00%	7 Orang	
<b>3</b>	<b>Terkendalinya Harga Bahan Pokok</b>		<b>16.617.000</b>	<b>16.575.858</b>	99,75%		
	<b>Meningkatkan Stabilisasi Harga barang kebutuhan Pokok dan barang penting</b>		16.617.000	16.575.858	99,75%		
	Meningkatnya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting		<b>16.617.000,00</b>	<b>16.575.858,00</b>	99,75%		
	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		5.487.000,00	5.446.734,00	99,27%	7 Orang	
	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		11.130.000,00	11.129.124,00	99,99%	7 Orang	

4	<b>Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing</b>		<b>1.163.306.650</b>	<b>1.040.571.112</b>	89,45%		
	<b>Meningkatkan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b>		<b>486.495.000</b>	<b>486.475.000</b>	100,00%		
	Tersedianya rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		486.495.000,00	486.475.000,00	100,00%		
	Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		486.495.000,00	486.475.000,00	100,00%	9 Orang	
	<b>Meningkatkan Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi</b>		<b>54.211.000,00</b>	<b>53.818.500,00</b>	99,28%		
	Terlaksananya Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		54.211.000,00	53.818.500,00	99,28%		
	Terlaksananya Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		54.211.000,00	53.818.500,00	99,28%	9 Orang	
	<b>Meningkatkan Penilaian Kesehatan KSP/USP/Koperasi</b>		<b>12.463.400</b>	<b>12.452.900</b>	99,92%		
	Terselenggaranya Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam/Unit simpan pinjam koperasi		12.463.400,00	12.452.900,00	99,92%		
	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		12.463.400,00	12.452.900,00	99,92%	9 Orang	
	<b>Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>		<b>460.299.250</b>	<b>340.151.122</b>	73,90%		
	Terlaksananya Pemberdayaan UMKM melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan		460.299.250,00	340.151.122,00	73,90%		
	Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain		333.460.000,00	217.815.000,00	65,32%	7 Orang	
	Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro		18.100.000,00	17.700.000,00	97,79%	7 Orang	
	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro		8.739.250,00	8.140.785,00	93,15%	7 Orang	
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan		100.000.000,00	96.495.337,00	96,50%	7 Orang	
	<b>Berkembangnya UMKM</b>		<b>149.838.000</b>	<b>147.673.590</b>	98,56%		
	Terselenggaranya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		149.838.000,00	147.673.590,00	98,56%		
	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya		18.473.000,00	17.375.700,00	94,06%	7 Orang	
	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		131.365.000,00	130.297.890,00	99,19%	7 Orang	
	<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>10.088.316.164</b>	<b>9.127.052.470</b>	<b>90,47%</b>		

## 7. Analisis Evaluasi Program /Kegiatan

TABEL 3.7 ANALISIS EVALUASI PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Capaian (%)	Target Capaian Sasaran			Tidak Terkait Pencapaian Sasaran			Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub.Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub.Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kinerja Dinas Perindagkop dan UKM	Persentase Nilai SAKIP Dinas Perindagkop dan UKM		Program Penujng Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Program Penujng Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	
						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

		Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
								pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				
						Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				
						Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di Wilayah kabupaten/kota				
					Pembinaan terhadap Pengelola sarana Distribusi perdagangan masyarakat di Wilayah kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				

				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Nasional				
				<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	Pelaksanaan Metrologi legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera-Tera Ulang				
						Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				
				<b>Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri</b>	Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota				
<b>Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan</b>	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi ,Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				
						Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas)				
						Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas				
3	<b>Terkendalinya Harga Bahan Pokok</b>	Persentase Bahan Pokok yang terkendalikan Harganya	100%	<b>Program Stabilisasi Harga barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting</b>	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasara Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				
						Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/kota				

4	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing	Persentase Koperasi Sehat	112,5%	<b>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b>	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>					
				<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota</i>					
				<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>	Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>					
	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing	Persentase Pertumbuhan UMKM	53,46%	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Pemangku kepentingan	<i>Pemulihan Usaha Mikro</i>					
						<i>Fasilitasi dan Standarisasi Usaha Mikro</i>					
						<i>Penyusunan Basis Data Usaha Mikro</i>					
						<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan</i>					
				<b>Program Pengembangan UMKM</b>	Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	<i>Pengembangan Usaha Mikro</i>					
			<i>Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi</i>								

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab.Wajo melaksanakan 4 sasaran dan memiliki 13 Program, 20 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan, Terdiri dari :

- a. yang terkait dengan sasaran ada 13 Program, 14 Kegiatan dan 31 Sub kegiatan.
- b. Sedangkan yang tidak terkait dengan Sasaran ada 1 Program, 6 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan

Adapun 4 Sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo Tahun 2025 adalah :

### **1. Meningkatkan kinerja Disperindagkop dan UKM**

Pencapaian d a r i Sasaran Meningkatkan kinerja Disperindagkop dan UKM melalui 1 program dan 1 Kegiatan dan 5 sub.kegiatan yaitu Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota yang didukung dengan adanya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub.Kegiatan antara lain Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD,

Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP serta Evaluasi kinerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah dan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Adapun Kegiatan dan sub kegiatan yang tidak terkait dengan Sasaran yang didukung dengan 6 Kegiatan dan 16 sub.kegiatan sebagai berikut, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub.kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub.kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor.

Kegiatan pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub.kegiatan ; Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya.

### **2. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan**

Pencapaian sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan mempunyai 2 indikator yaitu:

1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di dukung melalui 4 program, 5 Kegiatan dan 8 Sub.Kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran tersebut yaitu Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan didukung 2 kegiatan yaitu Kegiatan

Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan dengan sub kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dan sub kegiatan Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di Wilayah kabupaten/kota. Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola sarana Distribusi perdagangan masyarakat di Wilayah kerjanya dengan 1 sub kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan. Program Pengembangan Ekspor dengan kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pameran Dagang Nasional. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dan Kegiatan Pelaksanaan Metrologi legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan, sub.kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera-Tera Ulang dan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri dengan Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan di atas melibatkan secara langsung para Pelaku Usaha dan Pedagang yang ada di Kabupaten Wajo.

**Indikator ke 2** : Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB, didukung melalui 2 program dan 2 Kegiatan dan 5 Sub.Kegiatan yaitu Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan sub.kegiatan Koordinasi ,Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dan Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub.kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan Sub.Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS;

Pelaksanaan Program dan Kegiatan di atas melibatkan secara langsung Kelompok IKM dan kelompok petani murbay yang ada di Kabupaten Wajo.

### **3. Terkendalnya Harga Bahan Pokok**

Pencapaian sasaran Terkendalnya Harga Bahan Pokok melalui 1 program, 1 Kegiatan dan 2 Sub.Kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran tersebut yaitu Program Stabilisasi Harga barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting dengan kegiatan Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasara Kabupaten/Kota dengan sub, kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota dan sub. Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/kota.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan di atas melibatkan secara langsung Kelompok Pedagang dan masyarakat.

### **4. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Berdaya Saing.**

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Berdaya Saing mempunyai 2 indikator yaitu :

1. Persentase Koperasi Sehat yang didukung oleh 3 program dan 3 Kegiatan dan 3 Sub.kegiatan yaitu Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan sub.kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Sub.Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota. Dan Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan sub.kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Program dan kegiatan diatas melibatkan secara langsung para pelaku Koperasi yang ada dikabupaten wajo .

Indikator 2: Persentase Pertumbuhan UMKM dengan dukungan 2 Program 2 kegiatan dan 6 sub.kegiatan Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan, Perizinan,Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Pemangku kepentingan serta sub.kegiatan Pemulihan Usaha Mikro, Sub Kegiatan Fasilitasi dan Standarisasi Usaha Mikro, sub kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro dan Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan. dan Program Pengembangan UMKM dengan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil sub kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dan sub.Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan di atas melibatkan secara langsung para pelaku UMKM dan Masyarakat yang ada di Kabupaten Wajo.

## **B. Realisasi Anggaran**

Dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo telah mencapai nilai melebihi target yang ditentukan.

Evaluasi telah dilakukan setelah penetapan indikator dan penetapan capaian kinerja. Evaluasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo dapat diawali dengan penilaian terhadap kinerja kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Pengukuran Kinerja sesuai Renja Tahunan dan Indikator Kinerja.

Berdasarkan hasil dari pengukuran Kinerja Kegiatan dalam suatu program, dapat dilakukan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan analisis akuntabilitas kinerja.

Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, Akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo dapat untuk target dan realisasi dari anggaran dapat dicapai seperti tersebut pada tabel 3.8 sebagai berikut

## 1. REALISASI ANGGARAN

**TABEL 3.8 REALISASI ANGGARAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN WAJO TAHUN 2025**

No	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2024														Keterangan	
		Jumlah Pagu						Realisasi						Capaian (%)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial		Belanja Modal		Total Belanja
	<b>Program Penujng Urusan Pemerintah Daerah</b>	6.334.120.414	955.674.500	-	-	-	-	7.289.794.914	5.711.005.592	922.049.734	-	-	-	-	6.633.055.326	90,99%	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	-	22.883.000	-	-	-	-	22.883.000	-	21.932.449	-	-	-	-	21.932.449	95,85%	
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	-	6.780.000	-	-	-	-	6.780.000	-	6.481.262	-	-	-	-	6.481.262	95,59%	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	-	3.324.000	-	-	-	-	3.324.000	-	3.265.287	-	-	-	-	3.265.287	98,23%	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	-	3.324.000	-	-	-	-	3.324.000	-	3.265.287	-	-	-	-	3.265.287	98,23%	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	-	2.200.000	-	-	-	-	2.200.000	-	2.143.555	-	-	-	-	2.143.555	97,43%	
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-	4.050.000	-	-	-	-	4.050.000	-	3.653.710	-	-	-	-	3.653.710	90,22%	
	<i>Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah</i>	-	955.000	-	-	-	-	955.000	-	873.348	-	-	-	-	873.348	91,45%	
	<i>Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	-	2.250.000	-	-	-	-	2.250.000	-	2.250.000	-	-	-	-	2.250.000	100,00%	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	6.334.120.414	5.459.000	-	-	-	-	6.339.579.414	5.711.005.592	5.441.660	-	-	-	-	5.716.447.252	90,17%	
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	6.334.120.414	-	-	-	-	-	6.334.120.414	5.711.005.592	-	-	-	-	-	5.711.005.592	90,16%	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	-	4.929.000	-	-	-	-	4.929.000	-	4.911.660	-	-	-	-	4.911.660	99,65%	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan/Semesteran SKPD</i>	-	530.000	-	-	-	-	530.000	-	530.000	-	-	-	-	530.000	100,00%	

<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	-	16.489.800	-	-	-	-	16.489.800	-	16.437.103	-	-	-	-	16.437.103	99,68%	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	16.489.800	-	-	-	-	16.489.800	-	16.437.103	-	-	-	-	16.437.103	99,68%	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	-	8.500.000	-	-	-	-	8.500.000	-	8.499.417	-	-	-	-	8.499.417	99,99%	
<i>Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</i>	-	8.500.000	-	-	-	-	8.500.000	-	8.499.417	-	-	-	-	8.499.417	99,99%	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	-	217.872.900	-	-	-	-	217.872.900	-	215.379.769	-	-	-	-	215.379.769	98,86%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	2.998.000	-	-	-	-	2.998.000	-	2.972.147	-	-	-	-	2.972.147	99,14%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	2.497.700	-	-	-	-	2.497.700	-	2.384.613	-	-	-	-	2.384.613	95,47%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	15.022.000	-	-	-	-	15.022.000	-	14.460.303	-	-	-	-	14.460.303	96,26%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		197.355.200					197.355.200		195.562.706					195.562.706	99,09%	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	563.619.800	-	-	-	-	563.619.800	-	534.467.109	-	-	-	-	534.467.109	94,83%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	32.509.800	-	-	-	-	32.509.800	-	32.016.898	-	-	-	-	32.016.898	98,48%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	-	72.000.000	-	-	-	-	72.000.000	-	67.540.211	-	-	-	-	67.540.211	93,81%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	459.110.000	-	-	-	-	459.110.000	-	434.910.000	-	-	-	-	434.910.000	94,73%	
<b>pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		120.850.000					120.850.000		119.892.227					119.892.227	99,21%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	89.900.000	-	-	-	-	89.900.000	-	89.136.227	-	-	-	-	89.136.227	99,15%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	-	11.967.500	-	-	-	-	11.967.500	99,73%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	-	18.950.000	-	-	-	-	18.950.000	-	18.788.500	-	-	-	-	18.788.500	99,15%	

<b>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b>	-	486.495.000	0	-	-	-	486.495.000	-	486.475.000	0	-	0	-	486.475.000	100,00%	
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	486.495.000		-	-	-	486.495.000	-	486.475.000		-	-	-	486.475.000	100,00%	
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	486.495.000	-	-	-	-	486.495.000	-	486.475.000	-	-	-	-	486.475.000	100,00%	
<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	-	54.211.000	0	-	-	-	54.211.000	-	53.818.500	0	-	0	-	53.818.500	99,28%	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	54.211.000		-	-	-	54.211.000	-	53.818.500		-	-	-	53.818.500	99,28%	
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	-	54.211.000	-	-	-	-	54.211.000	-	53.818.500	-	-	-	-	53.818.500	99,28%	
<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>		12.463.400					12.463.400		12.452.900					12.452.900	99,92%	
Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		12.463.400					12.463.400		12.452.900					12.452.900	99,92%	
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	12.463.400	-	-	-	-	12.463.400	-	12.452.900	-	-	-	-	12.452.900	99,92%	
<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>		460.299.250		-	-		460.299.250		340.151.122		-	-		340.151.122	73,90%	
Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Pemangku kepentingan		460.299.250		-	-		460.299.250		340.151.122		-	-		340.151.122	73,90%	
Pemulihan Usaha Mikro		333.460.000		-	-		333.460.000		217.815.000		-	-		217.815.000	65,32%	
Fasilitasi dan Standarisasi Usaha Mikro		18.100.000		-	-		18.100.000		17.700.000		-	-		17.700.000	97,79%	
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro		8.739.250		-	-		8.739.250		8.140.785		-	-		8.140.785	93,15%	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan		100.000.000		-	-		100.000.000		96.495.337		-	-		96.495.337	96,50%	

<b>Program Pengembangan UMKM</b>		149.838.000		-	-		149.838.000		147.673.590		-	-		147.673.590	98,56%
Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		149.838.000		-	-		149.838.000		147.673.590		-	-		147.673.590	98,56%
<i>Pengembangan Usaha Mikro</i>		18.473.000		-	-		18.473.000		17.375.700		-	-		17.375.700	94,06%
<i>Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi</i>		131.365.000		-	-		131.365.000		130.297.890		-	-		130.297.890	99,19%
<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	-	230.196.000				893.141.000	1.123.337.000	-	167.196.234				791.012.000	958.208.234	85,30%
Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	-	48.463.000				893.141.000	941.604.000	-	48.091.434				791.012.000	839.103.434	89,11%
<i>Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	-	35.830.000				893.141.000	928.971.000	-	35.469.136				791.012.000	826.481.136	88,97%
<i>Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	-	7.096.000				-	7.096.000	-	7.085.614				-	7.085.614	99,85%
<i>Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di Wilayah kabupaten/kota</i>	-	5.537.000				-	5.537.000	-	5.536.684				-	5.536.684	99,99%
Pembinaan terhadap Pengelola sarana Distribusi perdagangan masyarakat di Wilayah kerjanya		181.733.000				-	181.733.000		119.104.800				-	119.104.800	65,54%
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		181.733.000				-	181.733.000		119.104.800				-	119.104.800	65,54%
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		341.826.700		-	-		341.826.700		332.415.520		-	-		332.415.520	97,25%
Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		341.826.700		-	-		341.826.700		332.415.520		-	-		332.415.520	97,25%
Pameran Dagang Nasional		341.826.700		-	-		341.826.700		332.415.520		-	-		332.415.520	97,25%

<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>		<b>19.886.000</b>				<b>11.500.000</b>	<b>31.386.000</b>		<b>19.750.683</b>				<b>10.545.000</b>	<b>30.295.683</b>	<b>96,53%</b>
Pelaksanaan Metrologi legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan		19.886.000				11.500.000	31.386.000		19.750.683				10.545.000	30.295.683	96,53%
Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera-Tera Ulang		14.399.000				11.500.000	25.899.000		14.268.219				10.545.000	24.813.219	95,81%
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		5.487.000					5.487.000		5.482.464					5.482.464	99,92%
<b>Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri</b>		<b>7.676.800</b>					<b>7.676.800</b>		<b>4.792.690</b>					<b>4.792.690</b>	<b>62,43%</b>
Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		7.676.800					7.676.800		4.792.690					4.792.690	62,43%
<i>Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota</i>		7.676.800					7.676.800		4.792.690					4.792.690	62,43%
<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	-	<b>103.666.100</b>	<b>0</b>	-	-	-	<b>103.666.100</b>	-	<b>100.754.163</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>100.754.163</b>	<b>97,19%</b>
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	103.666.100	0	-	-	-	103.666.100	-	100.754.163	0	-	0	-	100.754.163	97,19%
Koordinasi ,Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-	41.971.600	-	-	-	-	41.971.600	-	41.197.543	-	-	-	-	41.197.543	98,16%
Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-	17.938.500	-	-	-	-	17.938.500	-	16.105.500	-	-	-	-	16.105.500	89,78%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-	43.756.000	-	-	-	-	43.756.000	-	43.451.120	-	-	-	-	43.451.120	99,30%

<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		10.705.000					10.705.000		10.383.884					10.383.884	97,00%	
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		10.705.000					10.705.000		10.383.884					10.383.884	97,00%	
<i>Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas)</i>	-	8.110.000	-	-	-	-	8.110.000	-	7.788.953	-	-	-	-	7.788.953	96,04%	
<i>Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas</i>	-	2.595.000	-	-	-	-	2.595.000	-	2.594.931	-	-	-	-	2.594.931	100,00%	
<b>Program Stabilisasi Harga barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting</b>		16.617.000					16.617.000		16.575.858					16.575.858	99,75%	
Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasara Kabupaten/Kota		16.617.000					16.617.000		16.575.858					16.575.858	99,75%	
<i>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</i>		5.487.000					5.487.000		5.446.734					5.446.734	99,27%	
<i>Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/kota</i>		11.130.000					11.130.000		11.129.124					11.129.124	99,99%	
<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN</b>	6.334.120.414	2.849.554.750	-	-	-	904.641.000	10.088.316.164	5.711.005.592	2.614.489.878	-	-	-	801.557.000	9.127.052.470	90,47%	

Berdasarkan table di atas Realisasi anggaran sampai dengan akhir periode pelaporan menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Dari total pagu anggaran yang tersedia, telah terealisasi sebesar 90,47 %, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pagu Anggaran Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 10.088.316.164,00** dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 9.127.052.470,0** atau 90,47 %. dengan predikat kinerja keuangan “Tinggi”. Hal tersebut tidak terlepas dari penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan pada Perubahan Anggaran Kegiatan untuk menyesuaikan target kinerja dan anggaran yang diperlukan.

Analisis akuntabilitas kinerja Dinas Perindagkop dan UKM tidak terlepas dari implementasi tugas pokok dan fungsi Dinas Peindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang meliputi pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penatausahaan dan pelaporan .

Pencapaian Kinerja yang dilakukan sesuai program dan kegiatan yang bersifat kedalam yakni mendukung tugas pokok dan fungsi, berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme dengan melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian serta perencanaan.

Pencapaian kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo pada tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja yang dilakukan sesuai program dan kegiatan yang bersifat ke dalam yakni mendukung tugas pokok dan fungsi, berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme dengan melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawain dan perencanaan.
2. Capaian Kinerja Program dan kegiatan yang bersifat keluar yaitu menjadi organisasi yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

## 2. RASIO BELANJA TERHADAP SASARAN PERANGKAT DAERAH

**TABEL 3.9 RASIO BELANJA TERHADAP SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

No	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan yang terkait langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025		Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan yang TIDAK Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025		Keterangan
		Jumlah Pagu	Realisasi		Jumlah Pagu	Realisasi	
1		4	5	6	7	8	9
1	<b>Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah</b>	22.883.000	<b>21.932.449</b>	<b>Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>7.266.911.914</b>	<b>6.611.122.877</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	22.883.000	21.932.449	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	6.339.579.414	5.716.447.252	
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	6.780.000,00	6.481.262	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	6.334.120.414	5.711.005.592	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	3.324.000,00	3.265.287	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	4.929.000	4.911.660	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	3.324.000,00	3.265.287	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	530.000	530.000	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	2.200.000,00	2.143.555	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>16.489.800</b>	<b>16.437.103</b>	
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4.050.000,00	3.653.710	<i>Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	16.489.800,00	16.437.103,00	
	<i>Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah</i>	955.000,00	873.348	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.499.417</b>	
	<i>Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2.250.000,00	2.250.000	<i>Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</i>	8.500.000,00	8.499.417	

				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>217.872.900</b>	<b>215.379.769</b>	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.998.000,00	2.972.147	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.497.700,00	2.384.613	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.022.000,00	14.460.303	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.355.200,00	195.562.706	
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>563.619.800</b>	<b>534.467.109</b>	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.509.800,00	32.016.898	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	72.000.000,00	67.540.211	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	459.110.000,00	434.910.000	
				<b>pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>120.850.000</b>	<b>119.892.227</b>	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.900.000,00	89.136.227,00	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	11.967.500,00	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	18.950.000,00	18.788.500,00	

2	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>1.123.337.000</b>	<b>958.208.234</b>				
	Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	<b>941.604.000</b>	839.103.434				
	<i>Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	928.971.000,00	826.481.136				
	<i>Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	7.096.000,00	7.085.614				
	<i>Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di Wilayah kabupaten/kota</i>	5.537.000,00	5.536.684				
	Pembinaan terhadap Pengelola sarana Distribusi perdagangan masyarakat di Wilayah kerjanya	<b>181.733.000,00</b>	119.104.800				
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	181.733.000,00	119.104.800				
3	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>341.826.700</b>	<b>332.415.520</b>				
	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>341.826.700,00</b>	332.415.520				
	Pameran Dagang Nasional	341.826.700,00	332.415.520				
4	<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>31.386.000</b>	<b>30.295.683</b>				
	Pelaksanaan Metrologi legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan	<b>31.386.000,00</b>	30.295.683				
	Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera-Tera Ulang	25.899.000,00	24.813.219				
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	5.487.000,00	5.482.464				

5	<b>Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri</b>	<b>7.676.800,00</b>	<b>4.792.690,00</b>				
	Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<b>7.676.800,00</b>	4.792.690				
	<i>Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota</i>	7.676.800,00	4.792.690				
6	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>103.666.100</b>	100.754.163				
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<b>103.666.100,00</b>	100.754.163				
	Koordinasi ,Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	41.971.600,00	41.197.543				
	Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	17.938.500,00	16.105.500				
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	43.756.000,00	43.451.120				
7	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>10.705.000</b>	<b>10.383.884</b>				
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>10.705.000,00</b>	<b>10.383.884,00</b>				
	<i>Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas)</i>	8.110.000,00	7.788.953,00				
	<i>Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas</i>	2.595.000,00	2.594.931,00				
8	<b>Program Stabilisasi Harga barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting</b>	<b>16.617.000</b>	<b>16.575.858</b>				
	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasara Kabupaten/Kota	<b>16.617.000,00</b>	<b>16.575.858,00</b>				
	<i>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</i>	5.487.000,00	5.446.734,00				
	<i>Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/kota</i>	11.130.000,00	11.129.124,00				

	<b>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b>	<b>486.495.000</b>	<b>486.475.000</b>				
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<b>486.495.000,00</b>	<b>486.475.000,00</b>				
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	486.495.000,00	486.475.000,00				
	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>54.211.000,00</b>	<b>53.818.500,00</b>				
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<b>54.211.000,00</b>	<b>53.818.500,00</b>				
	<i>Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota</i>	54.211.000,00	53.818.500,00				
	<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>	<b>12.463.400</b>	<b>12.452.900</b>				
	Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>12.463.400,00</b>	<b>12.452.900,00</b>				
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	12.463.400,00	12.452.900,00				
	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>460.299.250</b>	<b>340.151.122</b>				
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Pemangku kepentingan	<b>460.299.250,00</b>	<b>340.151.122,00</b>				
	<i>Pemulihan Usaha Mikro</i>	333.460.000,00	217.815.000,00				
	<i>Fasilitasi dan Standarisasi Usaha Mikro</i>	18.100.000,00	17.700.000,00				
	<i>Penyusunan Basis Data Usaha Mikro</i>	8.739.250,00	8.140.785,00				
	<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan</i>	100.000.000,00	96.495.337,00				

	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>149.838.000</b>	<b>147.673.590</b>				
	Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	<b>149.838.000,00</b>	<b>147.673.590,00</b>				
	<i>Pengembangan Usaha Mikro</i>	18.473.000,00	17.375.700,00				
	<i>Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi</i>	131.365.000,00	130.297.890,00				
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>2.821.404.250</b>	<b>2.515.929.593</b>		<b>7.266.911.914</b>	<b>6.611.122.877</b>	

Berdasarkan tabel diatas rasio belanja yang terkait dengan Sasaran dengan rasio **89,17 %** dan rasio belanja yang tidak terkait dengan Sasaran dengan rasio **90,98%**. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab.Wajo dalam mendukung pencapaian visi misi kabupaten wajo rasio belanja yang tidak terkait dengan sasaran lebih besar dibandingkan dengan rasio belanja yang terkait dengan sasaran.

### 3. RASIO BELANJA TERHADAP SASARAN RPJMD

Rasio belanja Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo terhadap sasaran RPJMD sebagai berikut :

**TABEL 3.10 RASIO BELANJA TERHADAP SASARAN STRATEGIS RPD KABUPATEN WAJO TAHUN 2025-2026**

No	Sasaran Strategis RPD Kab.Wajo Tahun 2025-2026	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan yang terkait langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025		Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan yang tidak terkait langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025		Keterangan
			Jumlah Pagu	Realisasi		Jumlah Pagu	Realisasi	
1	2		4	5		7	8	9
1	Mewujudkan pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi dan akuntabel ( <i>sasaran 4</i> )	Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah	22.883.000	21.932.449	Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah	7.266.911.914	6.611.122.877	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.883.000	21.932.449	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.339.579.414	5.716.447.252	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.780.000	6.481.262	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.334.120.414	5.711.005.592	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.324.000	3.265.287	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.929.000	4.911.660	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.324.000	3.265.287	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	530.000	530.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.200.000	2.143.555	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	16.489.800	16.437.103	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.050.000	3.653.710	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16.489.800	16.437.103	
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	955.000	873.348	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.500.000	8.499.417	
		Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.250.000	2.250.000	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	8.500.000	8.499.417	

					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>217.872.900</b>	<b>215.379.769</b>	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.998.000	2.972.147	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.497.700	2.384.613	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.022.000	14.460.303	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.355.200	195.562.706	
					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>563.619.800</b>	<b>534.467.109</b>	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.509.800	32.016.898	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	72.000.000	67.540.211	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	459.110.000	434.910.000	
					<b>pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>120.850.000</b>	<b>119.892.227</b>	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.900.000	89.136.227	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	11.967.500	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	18.950.000	18.788.500	

2	Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas (Sasaran 1)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.123.337.000	958.208.234				
		Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	941.604.000	839.103.434				
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	928.971.000	826.481.136				
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7.096.000	7.085.614				
		Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di Wilayah kabupaten/kota	5.537.000	5.536.684				
		Pembinaan terhadap Pengelola sarana Distribusi perdagangan masyarakat di Wilayah kerjanya	181.733.000	119.104.800				
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	181.733.000	119.104.800				
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>341.826.700</b>	<b>332.415.520</b>				
		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	341.826.700	332.415.520				
		Pameran Dagang Nasional	341.826.700	332.415.520				
		<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>31.386.000</b>	<b>30.295.683</b>				
		Pelaksanaan Metrologi legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan	31.386.000	30.295.683				
		Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera-Tera Ulang	25.899.000	24.813.219				
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	5.487.000	5.482.464				

	<b>Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri</b>	<b>7.676.800</b>	<b>4.792.690,00</b>				
	Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<b>7.676.800</b>	4.792.690				
	<i>Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>7.676.800</i>	<i>4.792.690</i>				
	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>103.666.100</b>	100.754.163				
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<b>103.666.100</b>	100.754.163				
	<i>Koordinasi ,Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>	<i>41.971.600</i>	<i>41.197.543</i>				
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>	<i>17.938.500</i>	<i>16.105.500</i>				
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	<i>43.756.000</i>	<i>43.451.120</i>				
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>10.705.000</b>	<b>10.383.884</b>				
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>10.705.000</b>	<b>10.383.884,00</b>				
	<i>Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas)</i>	<i>8.110.000</i>	<i>7.788.953,00</i>				
	<i>Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas</i>	<i>2.595.000</i>	<i>2.594.931,00</i>				

3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat ( <i>Sasaran 9</i> )	<b>Program Stabilisasi Harga barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting</b>	16.617.000	16.575.858				
		Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasara Kabupaten/Kota	16.617.000	16.575.858				
		<i>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</i>	5.487.000	5.446.734				
		<i>Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/kota</i>	11.130.000	11.129.124				
4	Meningkatkan daya saing dan penempatan tenaga kerja ( <i>Sasaran 3</i> )	<b>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b>	486.495.000	486.475.000				
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	486.495.000	486.475.000				
		<i>Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	486.495.000	486.475.000				
		<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	54.211.000	53.818.500				
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	54.211.000	53.818.500				
		<i>Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota</i>	54.211.000	53.818.500				

		<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>	<b>12.463.400</b>	<b>12.452.900</b>				
		Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>12.463.400</b>	<b>12.452.900</b>				
		<i>Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>12.463.400</i>	<i>12.452.900</i>				
<b>5</b>	<b>Menurunnya Angka Kemiskinan (Sasaran 2)</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>460.299.250</b>	<b>340.151.122</b>				
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Pemangku kepentingan	<b>460.299.250</b>	<b>340.151.122</b>				
		<i>Pemulihan Usaha Mikro</i>	<i>333.460.000</i>	<i>217.815.000</i>				
		<i>Fasilitasi dan Standarisasi Usaha Mikro</i>	<i>18.100.000</i>	<i>17.700.000</i>				
		<i>Penyusunan Basis Data Usaha Mikro</i>	<i>8.739.250</i>	<i>8.140.785</i>				
		<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>100.000.000</i>	<i>96.495.337</i>				
		<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>149.838.000</b>	<b>147.673.590</b>				
		Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	<b>149.838.000</b>	<b>147.673.590</b>				
		<i>Pengembangan Usaha Mikro</i>	<i>18.473.000</i>	<i>17.375.700</i>				
		<i>Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi</i>	<i>131.365.000</i>	<i>130.297.890</i>				
	<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>2.821.404.250</b>	<b>2.515.929.593</b>		<b>7.266.911.914</b>	<b>6.611.122.877</b>	

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab.Wajo dalam mendukung tercapainya sasaran RPJMD yang terkait dengan sasaran lebih besar dengan rasio **89,17 %** dari Belanja yang tidak terkait dengan sasaran dengan rasio **90,98%**.

#### **'4. TINDAK LANJUT REKOMENDASI INSPEKTORAT DAERAH**

Menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), telah dilakukan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan temuan dan rekomendasi yang diberikan. Tindak lanjut tersebut meliputi penyempurnaan administrasi, perbaikan mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh tindak lanjut telah/ sedang dilaksanakan dan didokumentasikan sebagai bentuk komitmen peningkatan tata kelola yang baik.

Tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Daerah umumnya mencakup serangkaian langkah yang diambil oleh instansi terkait untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah mengenai temuan audit atau pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik. Tindak lanjut ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas tata kelola pemerintahan atau instansi terkait. Adapun tindak lanjut rekomendasi inspektorat daerah dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**TABEL 3.11 TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL EVALUASI INSPEKTORAT DAERAH 2025**

NO	REKOMENDASI INSPEKTORAT	TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Dokumen Perencanaan kinerja agar lebih maksimal mempublikasikan tepat waktu dalam esr.menpan.go.id , yakni seluruh dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan pokok maupun perubahan	Memastikan seluruh dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan pokok maupun dokumen perencanaan perubahan, dipublikasikan secara lengkap dan tepat waktu, meliputi Renstra, Renja, serta Perjanjian Kinerja	
2	Menyusun Laporan Montoring Evaluasi Triwulan I,II, III dan IV sesuai form E.81 Permendagri no 86 Tahun 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan koordinasi internal untuk mengumpulkan data capaian kinerja, realisasi program dan kegiatan pada setiap triwulan</li> <li>- Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan I, II, III, dan IV dengan berpedoman pada Form E.81 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, mencakup indikator kinerja, target, realisasi, permasalahan, dan upaya tindak lanjut.</li> <li>- Melakukan verifikasi dan validasi data capaian kinerja dan realisasi anggaran agar sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan Renja) serta laporan keuangan</li> <li>- Melakukan perbaikan dan penyempurnaan laporan berdasarkan hasil reuiu internal dan masukan dari pimpinan/perangkat pengawasan internal</li> </ul>	
3	Agar memberikan penjelasan Dalam Laporan Kinerja atas sumber data dan Cara Perhitungan Indikato Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjelaskan metode perhitungan, yaitu mencantumkan rumus, tahapan perhitungan, serta asumsi yang digunakan dalam pengukuran masing-masing Indikator Kinerja agar mudah dipahami dan dapat ditelusuri</li> <li>- Penyesuaian dengan dokumen perencanaan, dengan memastikan kesesuaian antara Indikator Kinerja pada Laporan Kinerja dengan Renstra, Perjanjian Kinerja, dan dokumen pendukung lainnya.</li> <li>- Penguatan validasi data, melalui koordinasi dengan bidang teknis untuk memastikan keakuratan, konsistensi, dan keterlacakan data yang digunakan.</li> <li>- Penyusunan standar penjelasan indikator, sebagai pedoman agar penyajian sumber data dan cara perhitungan Indikator Kinerja pada laporan selanjutnya lebih konsisten dan memenuhi kaidah akuntabilitas kinerja.</li> </ul>	
4	Agar menindaklanjuti seluruh temuan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya dengan melampirkan bukti dukung dan diupload di esr.menpan.go.id	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan identifikasi dan pemetaan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, baik yang terkait dengan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, maupun capaian kinerja</li> <li>- Melakukan perbaikan dan penyempurnaan dokumen SAKIP.</li> <li>- Melakukan reuiu internal terhadap hasil tindak lanjut untuk memastikan bahwa rekomendasi Inspektorat telah ditindaklanjuti secara memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Mengunggah seluruh dokumen tindak lanjut beserta bukti dukung ke aplikasi esr.menpan.go.id sesuai dengan menu dan tahapan yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB.</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan guna memastikan perbaikan akuntabilitas kinerja berjalan secara konsisten dan berkelanjutan pada periode berikutnya.</li> </ul>	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur secara teknis melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2025 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan serta efektifitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo tahun 2025 secara keseluruhan berhasil meskipun masih ada beberapa indikator yang terisi realisasi dan capainnya karena data belum ada dari statistik. Harapan kami bahwa dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

## B. Saran

Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo belajar dari penyusunan LKjIP tahunan merasa perlu memuat saran untuk stakeholder LKjIP Perangkat Daerah untuk perbaikan kualitas LKjIP sehingga data dan informasi yang tertuang pada LKjIP Perangkat Daerah dapat dinilai untuk menjadi dasar kebijakan dan strategi ke depan. Saran dimaksud antara lain:

1. Bahwa data capaian kinerja pada PK adalah akumulasi dari capaian kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sendiri dievaluasi per bulan, per triwulan, dan per semester. Di dalamnya juga terekam faktor penghambat dan pendorong atas capaian kinerja Program dan Kegiatan. Seluruh data tersebut akan menjadi acuan data dan informasi yang terangkum dalam LKjIP. Oleh karena itu, untuk memudahkan perekaman (*record*) data tersebut dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan LKjIP Perangkat Daerah, evaluasi capaian indikator kinerja Subkegiatan sampai dengan Sasaran sebaiknya terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. Sehingga perubahan dan penyesuaian yang dilakukan pada penganggaran maupun perencanaan kinerja dapat terekam secara *real-time*.
2. Perlunya peningkatan kualitas koordinasi semua stakeholder sejak tahap penyusunan sampai penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah.

Sengkang, 31 Januari 2025

Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo,





**ANDI ASO ASHARI, ST., M.Si**  
**NIP. 19651231 198612 1 007**

# LAMPIRAN :

## IV. Penghargaan

### DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN WAJO DAFTAR NAMA PENGHARGAAN TAHUN 2025

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TINGKAT			DOKUMENTASI/FOTO
			TINGKAT KABUPATEN	PROVINSI	NASIONAL/INTERNASIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sertifikat Indikasi Geografis untuk Tenun Sutra Sengkang	Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia			Nasional	
2	Piagam Penghargaan Pasar Tertib Ukur	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Ukur		-	Nasional	
3	Piagam Penghargaan OPD tercepat Pertama Mengirimkan LHKPN	Pemerintah Daerah/Bupati Wajo	Kabupaten	-	-	